

**MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM
DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM
(PERSPEKTIF DPD PKS KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

MUHAMMAD ILHAM

NPM. 1531040017

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM
DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM
(PERSPEKTIF DPD PKS KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



Pembimbing I : Dr. H. Arsyad Sobby, K. Lc., M.Ag.

Pembimbing II : Drs. Effendi, M.Hum

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM
DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM
(PERSPEKTIF DPD PKS KOTA BANDAR LAMPUNG)**

ABSTRAK

Oleh :

Muhammad Ilham

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang memiliki beragam suku, adat, budaya, dan agama. Negara Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam atau sebagai muslim, namun dengan adanya keragaman agama dan kebebasan hak politik di Indonesia, sangat memungkinkan bahwa akan adanya kepemimpinan dengan dipimpin oleh seorang yang memiliki perbedaan keyakinan atau seorang non muslim sehingga dalam pandangan memilih pemimpin, akan menimbulkan kontravensi dalam hal memilih pemimpin non muslim dinegara mayoritas muslim. Rumusan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung sebagai partai dakwah Islam melihat memilih pemimpin non muslim di Negara mayoritas muslim dan pengaruh pandangan tersebut terhadap eksistensi partai PKS. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian studi kasus (*field research*), dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan cara interview atau wawancara serta dibantu oleh beberapa dokumen, buku, artikel, dan jurnal. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung dan masyarakat, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku, dan artikel. Temuan dalam penelitian ini, DPD PKS Kota Bandar Lampung sebagai partai dawah Indonesia memiliki prinsip dan landasan politik Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun untuk memilih pemimpin, hendaknya sebagai seorang muslim untuk memilih pemimpin dengan satu keyakinan dan pemahaman yaitu pemimpin yang memeluk agama Islam. Kecuali saat kita berada didaerah dengan mayoritas penduduknya adalah seorang non muslim, maka diperbolehkan seorang muslim untuk memilih pemimpin non muslim, dengan lebih memperhatikan atautkah ia merupakan seorang pemimpin yang akan menindas Islam atau bahkan menjelek-jelekan Islam, atau benar seorang yang adil dan bijaksana tentunya dengan berbagai pertimbangan dan pengetahuan. Perspektif tersebut tidaklah mempengaruhi eksistensi partai PKS, dengan perspektifnya sendiri justru membuat partai PKS dalam keadaan yang semakin membaik, atas dukungan dan kepercayaan masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Memilih Pemimpin, Non-Muslim, PKS.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suraimin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS KOTA
BANDAR LAMPUNG)**

Nama : Muhammad Ilham

NPM : 1531040017

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. H. Arsyad Sobhy K, Lc., M.Ag.

NIP.195808231993031001

Pembimbing II

Drs. Effendi, M.Hum

NIP.195807211986031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

NIP.197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratinin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS KOTA BANDAR LAMPUNG)**. Disusun oleh, **MUHAMMAD ILHAM NPM: 1531040017**, Program Studi: **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, Telah diujikan pada sidang Munaqasyah di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si. 

Sekretaris : Angga Natalia, M.I.P. 

Pembahas Utama : Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag. 

Penguji Pendamping I : Dr. Arsyad Sobhy Kesuma, M.Ag. 

Penguji Pendamping II : Drs. Effendi, M.Hum 

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

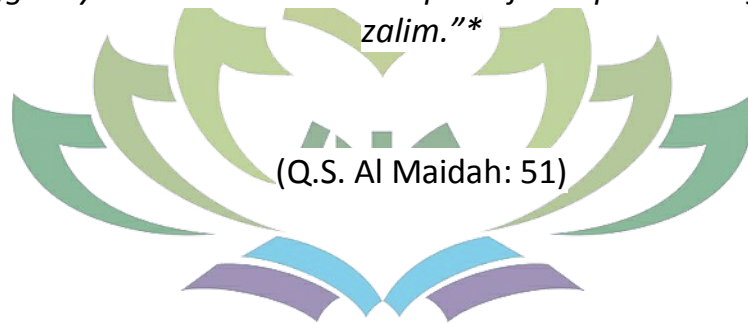


D. H. M. Afif Anshori, M.Ag.
NIP. 196003131989031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”**



* Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 117.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobilalamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kupinta dan kusempatkan hanya kepada engkau Allah SWT Rabb semesta alam yang maha Esa, dan atas takdir dan segala nikmat-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil, dan skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibundaku tercinta Putri Emti dan Ayahku tercinta Yose Rizal terimakasih atas segala cinta, doa, kesbar, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, berkat pengorbanan jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aminyarabbal'amin.*
2. Abangku terkasih dan tersayang Muhammad Ichsan, dan adikku Aisyah Putri yang senantiasa mendukung dengan doa maupun materi yang diberikan untukku.
3. Almamaterku tercinta tempat kumencari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir didunia dan menjadi anak dari seorang ayahanda Yose Rizal dan Ibunda Putri Emti, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis di anugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Muhammad Ilham. Dilahirkan pada tanggal 17 April 1997 di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

1. Tk Al Munawaroh Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung tamat pada tahun 2003.
2. SD Negeri 2 Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung , tamat pada tahun 2009.
3. SMP Muhammadiyah 3, Bandar Lampung tamat pada tahun 2012.
4. SMAS Daar El-Qolam 2, Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tamat pada tahun 2015.
5. Strata 1 Program Studi Pemikiran Politik Islam di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2019

Muhammad Ilham
1531040017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillahirrabilalamin kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, dan anugrah yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh penulis , sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan sallam tak lupa kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh akhlakulkarimah bagi seluruh muslim di seluruh Dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Sosial dalam Program Pendidikan Pemikiran Politik Islam S1 pada Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul: **“MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS KOTA BANDAR LAMPUNG)”**. Ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Ini yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**, selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak **Dr. Kiki Muhammad Hakiki, MA**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam bidang akademik semasa dibangku kuliah.
5. Bapak **Dr. H. Arsyad Sobby K, Lc., M.Ag**, dan Bapak **Drs. Effendi, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswa nya dengan baik dalam proses menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam Angkatan 2015 yang telah saling *support* dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
9. Sahabat sekaligus keluarga seperjuangan Sandra Wijaya, S.Sos., Robi November Ilahi, S. Sos., Ahmad Guntur Saputra, S. Sos., Fakhrurazi, S. Sos., terimakasih atas kebersamaannya, dukungan dan motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarokatuh

Bandar Lampung, 31 Agustus 2019

Muhammad Ilham
1531040017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Metode Penelitian	13

BAB II NEGARA, KEPEMIMPINAN, DAN PARTAI POLITIK

A. Negara	21
1. Pengertian Negara	21
2. Fungsi Negara	22
3. Tujuan Negara.....	23
B. Kepemimpinan.....	23
1. Pemimpin	24
2. Fungsi Pemimpin	25
3. Ciri-ciri Pemimpin	28
4. Tipe Pemimpin.....	29

C. Partai Politik.....	32
1. Pengertian Partai Politik	32
2. Fungsionaris	35
3. Pemilihan Umum (Pemilu)	35
4. Memilih Pemimpin Dalam Islam	36
5. Eksistensi	44
a. Pengertian Eksistensi	44
b. Ciri-ciri Eksistensi	44
D. Tinjauan Pustaka	46

BAB III PROFIL DPD PKS KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah Partai Keadilan asehajtera (PKS)	49
1. Profil DPD PKS Kota Bandar Lampng	51
B. Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Bandar Lampung	53
1. Ideologi PKS	55
2. Visi dan Misi PKS	56
3. Tujuan dan Fungsi	56
C. Dinamika DPD PKS Kota Bandar Lampung Dalam PILKADA.....	57
1. Perspektif Fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung Dalam Memilih Pemimpi	57
2. Perjalanan Politik PKS.....	62

BAB IV PERSPEKTIF DAN EKSISTENSI DPD PKS KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM

A. Perspektif Fungsionaris PKS Sebagai Partai Dakwah Islam Melihat Memilih Pemimpin Non Muslim Di Negara Mayoritas Muslim.....	64
B. Pengaruh Pandangan Memilih Pemimpin Non Muslim Pada Eksistensi Partai PKS	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami skripsi ini, peneliti akan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi judul ini. Judul skripsi ini adalah ***“MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM (Perspektif DPD PKS Kota Bandar Lampung)”***.

Memilih Pemimpin anggota legislatif non muslim dalam judul ini adalah memilih pemimpin dalam sebuah Negara atau sebuah daerah dimana dalam pemilihan pemimpinnya yang berasal dari non muslim, yaitu memilih pemimpin yang bukan berasal dari agama Islam.¹

Negara Indonesia, dengan jumlah mayoritas muslim merupakan sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah dengan notaben masyarakatnya mayoritas muslim dan tersusun dalam struktur organisasi dengan pemeritahan yang memiliki kedaulatan dan telah disepakati. Dapat disebut juga suatu wilayah yang memiliki sebuah sistem dan aturan yang berlaku diwilayah tersebut bagi seluruh orang yang menempati.²

Perspektif DPD PKS adalah pandangan dari orang-orang yang memiliki kedudukan dalam kepengurusan atau fungsionaris sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris didalam stuktur organisasi DPD PKS Kota Bandar Lampung.

¹ Irawaty A. Kahar, “*Konsep Kepemimpinan Dalam Perubahan Organisasi*”. Jurnal Studi Perpustakaan Dan Informasi, Vol.4 no. 1 (Juni 2008), h. 23

² Muhar IbnuSyarif, “*Hak-Hak Politik Minoritas Non Msulim Dalam Komunitas Islam*”(Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 30.

Berdasarkan penegasan judul yang telah dipaparkan adalah penulis akan meneliti dan akan membahas mengenai MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM (Perspektif DPD PKS Kota Bandar Lampung), Negara yang mayoritas muslim masih memilih pemimpin non muslim dan seperti yang terjadi diprovinsi lampung masih terdapat anggota legislative tingkat provinsi non islam yang mencalonkan diri didaerah pilih dengan mayoritas muslim dan terpilih maka penulis tertarik dalam penelitian ini untuk membahas bagaimana prespektif partai Islam salah satu nya para fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung melihat pandangan memilih pemimpin non muslim di Negara mayoritas muslim dan bagaimana pengaruh pandangan tersebut terhadap eksistensi partai PKS.

B. Alasan Memilih Judul

1. Sedikitnya penelitian mengenai memilih pemimpin non muslim dengan studi yang melibatkan peran partai politik Islam, dan masih banyak terjadi dikalangan negara mayoritas muslim memilih pemimpin non muslim. PKS sebagai partai dakwah Islam yang berbeda dengan partai-partai lain, serta fungsionaris PKS melihat masyarakat muslim yang masih memilih pemimpin non muslim senantiasa untuk dikaji karna melahirkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.
2. Judul yang diajukan terdapat relevansinya dengan jurusan yang diambil oleh penulis di fakultas ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang mencukupi dan memungkinkan peneliti dapat menyelesaikan

dengan waktu yang telah ditargetkan. Lokasi penelitian sangat terjangkau tidak jauh dari tempat penulis, serta tersediannya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penelitian, yang mempermudah penulis mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga memungkinkan penelitian dapat menyelesaikan dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi atau suatu lembaga tertinggi pada kelompok masyarakat, yang terdiri atas sekelompok orang yang ada pada wilayah tertentu, memiliki tujuan untuk hidup bersama, dan berdaulat, serta memiliki sistem pemerintahan yang baik. Suatu Negara biasa disebut juga sebagai asosiasi tertinggi manusia yang terdapat pada wilayah tertentu, dengan memiliki sistem aturan dan sistem pemerintahan berdaulat yang berlaku bagi seluruh masyarakat dengan cara independen.

Negara memiliki beberapa bentuk salah satu nya Negara Indonesia yang memiliki bentuk Negara kesatuan, yang merupakan suatu Negara dengan kekuasaan tertingginya berada pada pemerintahan pusat. Negara kesatuan merupakan Negara bersusun tunggal yang berarti tidak terdapat Negara didalam Negara, Negara kesatuan memiliki ciri-ciri yaitu hanya memiliki satu undang-undang dasar, pemimpin Negara, dewan menteri, dan dewan perwakilan rakyat dan menganut sistem sentralistik dan desentralistik atau daerah dan didalam Negara kesatuan hanya dengan

menggunakan kebijakan tunggal terhadap masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah sosial, politik, ekonomi, keamanan, persatuan, dan budaya.³

Negara Indonesia yang berbentuk Negara kesatuan yang memiliki satu kepala Negara sebagai simbol pemimpin dan kepala Negara,⁴ tentunya ditunjuk atau dipilih dalam pemilihan umum yang dimana semua masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memimpin Negara bisa mencalonkan diri sebagai kepala Negara dan kepala daerah melalui partai-partai pengusung.

Indonesia yang kaya akan keragaman kebudayaan agama dan memiliki warga Negaranya yang mayoritas muslim tentu dalam menentukan pemimpin memiliki ragam pilihan karena di Indonesia sendiri memiliki keberagaman agama bukan hanya Islam saja tetapi ada seperti agama Hindu Kristen dan lain sebagainya, dan dapat kita lihat disini pada pemilihan anggota legislative DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro) pada tahun 2019, yaitu FX Siman beragama Kristen mencalonkan diri ditempat masyarakat yang mayoritas muslim dan sebagai masyarakat muslim boleh tidaknya seorang muslim yang memilih pemimpin non-muslim. Dengan demikian dapat dilihat melalui kacamata teologis diskursus yang merupakan kontroversial. Kontroversi dimensi ini muncul dikarenakan oleh dua sumber hukum utama Islam yaitu, al-Qur'an dan al-Sunnah, selain ditemukannya

³ Hotma p. sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2014), h. 32.

⁴ *Ibid*, h. 3.

beberapa dalil yang tidak memperbolehkan seorang muslim untuk memilih seorang pemimpin bukan Muslim (non-Islam) sebagai pemimpinnya, terdapat pada Al-Qur'an Surat Maidah ayat 51 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim”.*⁵

Masa kontemporer seperti saat ini atau bahkan dalil berupa larangan tersebut sudah tidak dapat diberlakukan untuk memberikan hak pilih kepada calon pimpinan yang berasal dari seorang bukan muslim (non-Islam) dengan keadaan seperti saat ini, dan jelas akan menimbulkan bermacam-macam pendapat. Polemik mengenai boleh-tidaknya seorang non-muslim untuk menjadi seorang pemimpin sebuah Negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam merupakan suatu konsekuensi nyata pada suatu negara, untuk memilih menjadi negara “abu-abu” daripada untuk memilih secara tegas apakah ia merupakan negara agama atau merupakan negara sekuler, meskipun Negara tersebut merupakan wacana negara agama yang masih sangat perlu ditinjau ulang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 117.

relevansinya dikarenakan setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi logis yang berbeda

Hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara sangat ditentukan oleh bentuk suatu negara.⁶ Suatu negara Islam memiliki konstitusi dan macam peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan kitab suci tidak mungkin menyukkseskan seorang non-Muslim menjadi pemimpin negara, disebabkan oleh seorang pemimpin negara Islam harus orang yang memiliki pemahaman secara luas dan khusus mengenai Islam, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk seorang non-muslim untuk menjadi seorang pemimpin. Sebaliknya, negara yang memiliki konstitusi dan peraturan perundang-undangannya tidak didasarkan pada ajaran agama, dan tidak memberikan syarat-syarat tertentu bagi calon pemimpin pada negaranya.

Dimasa kontemporer seperti saat ini, kontroversi mengenai kemungkinan-kemungkinan non-muslim menjadi seorang pemimpin dinegara dengan sebagian besar masyarakatnya yang memeluk agama Islam, secara susunan ataupun hal yang telah diterapkan pada berbagai Negara yang memiliki sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dan tetap berjalan sampai saat ini. Dikarenakan, sangat dikenal secara umum apabila dalam keadaan tersebut, Negara dengan sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam yang menetapkan peraturan sedikit berbeda dengan yang lainnya. Hal tersebut telah diterapkan oleh

⁶ Abdul Qodir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 92.

sebagian Negara dengan sebagian besar penduduk yang memeluk agama Islam yang terdapat pada kehidupan dunia pada masa kontemporer.

Indonesia mengalami dilema atas hal tersebut dimana secara normatif, konstitusi pada Negara Indonesia tidak mensyaratkan harus seorang Muslim untuk dapat mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin Negara (presiden). Namun secara umum seperti tanggapan masyarakat lebih cenderung pada logika proporsionalitas, yang dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dengan semestinya non-Muslim mustahil untuk terpilih menjadi presiden di Indonesia. Pertanyaannya selanjutnya, apakah dengan keadaan mayoritas keberagaman lantas dapat menjamin akan tidak diterimanya pemimpin dari minoritas. Berdasarkan hal tersebut seperti dapat dipahami untuk merujuk pada beberapa negara di dunia yang memiliki kaum minoritasnya sanggup untuk menduduki kepemimpinan kekuasaan.

Berbagai Negara di dunia saat ini yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, seperti Al-Jaza'ir, Mesir(Kairo), Pakistan, Suriah, Bangladesh, Yourdania, Malaysia, dan Iran. Seandainya secara bersama-sama untuk menetapkan seorang pemimpin atau kepala negaranya diharuskan seorang yang beragama Islam.⁷ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang yang tidak memeluk agama Islam (non-Islam) tidak diperbolehkan untuk memimpin negaranya. Sebagian diantara Negara dengan jumlah penduduk terbanyak pemeluk agama Islam yang

⁷ John L, Esposito, *Islam Dan Politik*, Terj, Joesoef Sou'yb dari *islam and politics*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 132.

terdapat didunia sangat memperizinkan, Serta sempat merasakan memiliki seorang pimpinan (presiden) yang tidak memeluk agama Islam (non Islam). Sampai pada saat ini terdapat 3 negara yang mampu dijadikan contoh seperti Libanon, Senegal. dan Nigeria. Nigeria dengan 76% jumlah sebagian besar penduduk memeluk agama Islam, sempat memiliki seorang pimpinan yang memeluk agama dan kepercayaan secara Kristen, yaitu Olusegun Obasan, Hal menarik dari Olusegun Obasanjo merupakan seorang non-muslim meskipun ia memeluk agama Kristen, nyatanya sebagai seorang non muslim ia mampu menjadi seorang pemimpin Nigeria dengan sebagian besar penduduk pengantut agama Islam selama 3 periode, dengan periode pertama (1976-1979), periode kedua (1999-2004), dan periode ketiga (2004-2007). Pada masa periode terakhirnya, Olusegun Obasanjo terpilih untuk menjadi seorang presiden Nigeria dengan melampaui kerabat terdekatnya yaitu Muhammad Bukhari. Olusegun Obasanjo memenagi dirinya pada pemilihan umum seorang pemimpin Nigeria tahun 2004 atas jumlah 62% suara.⁸

Senegal sama dengan Nigeria dengan 91 % penduduk Senegal memeluk agama Islam pun sempat merasakan memiliki seorang pemimpin yang memeluk agama Kristen Katolik, yaitu Leopold Sedar Senghor (1980-1988). Hal menarik selanjutnya adalah Libanon.⁹ Libanon dengan 75% jumlah sebagian besar penduduk yang memeluk agama Islam, semenjak tahun 1943 sampainya saat ini, terus berada dibawah pimpinan

⁸ Metro TV, Rabu 23 April 2004.

⁹ Iwan Gayo, Buku Pintar Seri Senior, (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2003), h. 558.

seorang yang tidak memeluk agama Islam (non-Islam) yang memeluk agama Kristen. Peristiwa tersebut dikarenakan pada tahun 1943 Libanon memperkenalkan sebuah Pakta Nasional (*al-Mitsaq al-Wathani*) dengan isi sebuah keputusan yang telah ditetapkan bahwa pemimpin Negara Libanon harus berasal dari Kristen Maronite, Perdana Menteri Muslim Sunny, Juru Bicara Parlemen Muslim Syi'ah, Menteri Pertahanan Muslim Druze, dan Menteri Luar Negeri Kristen Ortodok Yunani.¹⁰ Dikarenakan oleh Pakta Nasional yang masih diberlakukan maka sampai saat ini yang mampu untuk menjadi seorang pemimpin Libanon hanya seorang yang memeluk agama dan kepercayaan Kristen maronite.

Beberapa argumen dikalangan masyarakat pemeluk agama Islam, seperti Indonesia ataupun dinegara yang sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama Islam atau dapat disebut seorang muslim, yang tidak menyetujui seorang pemimpin non-Islam dimasa seperti saat ini, terlebih amat memungkinkan untuk mendapatkan pengaruh dari beberapa konsep Negara ideologis klasik yang memberi acuan suatu Negara dengan menggunakan doktrin Islam dengan mengandung seni sastra sunni klasik yaitu sebagai Negara dengan seorang pemimpin Islam (khilafah).

Dalam sebuah negara kepemimpinan dengan syariat Islam (kekhalifahan) pemimpin mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menjaga agama dan mengatur keadaan dunia (*hirasah al-din wa siyasa al-dunya*). Dikarenakan demikian, untuk menjadi penguasa secara umum dalam

¹⁰ Ketika Pakta Nasional 1943 itu disetujui perimbangan penduduk libanon sebagai berikut: Kristen 55 persen dan islam 45 persen, lihat tempo, 8 oktober 1983, h. 15.

berbagai masalah baik bidang agama dan dunia. Dalam bidang politik, khalifah mencakup tiga kekuasaan pada waktu bersamaan, yaitu kekuasaan berupa lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Meskipun pada bidang Agama, (khalifah) merupakan tugas untuk memerankan seorang imam shalat berjama'ah, memerankan seorang pemimpin pada kelompok haji (*amir al-hajj*), serta sebagai khotib di masjid, saat shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, ataupun shalat Idul Adha.

Berdasarkan uraian peran diatas menepatkan bahwa dalam negara yang menganut sistem kepemimpinan dengan syariat Islam atau kekhilafahan, kedudukan seorang pemimpin dengan kekhalifannya sangatlah berarti, dengan demikian masyarakat yang ada dibawah pimpinannya semua bergantung dan memberikan segala urusan ataupun kepentingan agama dan urusan kepentingan dunia.¹¹ Kondisi serta keadaan sosial politik seperti pada masa saat ini telah sangat cukup berbeda dengan keadaan sosial politik pada era klasik. Oleh sebab itu, dengan kondisi yang terlihat saat ini sangat dibutuhkan pendapat dan pemikiran baru menyinggung dengan kemungkinan bisa atau tidak diperbolehkannya non-Muslim dijadikan seorang khalifah atau pemimpin dinegara dengan sebagian besar pemeluk agama Islam.¹² Pada tahun 2019 di Provinsi Lampung bertepatan dengan diselenggarakan pemilihan anggota legislative tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dimana terdapat calon anggota

¹¹ Sakdiah, *Menejemen Organisasi Islam Suatu Pengantar*, (Banda Aceh: Dakwah Arraniry Press, 2015), h. 115.

¹² Mujar Ibnu Syarif, "Memilih Presiden NON-Muslim Di Negara Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Konsitusi*, vol.1 no1 (November 2008), h.92.

legislatif nomor urut 3 Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang berasal dari agama Kristen (non muslim) dan disini melihat bagaimana sikap partai Islam yang ada di Indonesia melihat ranah kanca perpolitikan di Indonesia yang notaben nya Indonesia memiliki mayoritas umat muslim terbesar di Indonesia, dalam hal ini bagaimana sikap partai Islam yang salah satu nya fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung, partai yang berbasis Islam melihat yang notaben nya masyarakat muslim memilih pemimpin non muslim.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM (Perspektif DPD PKS Kota Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif fungsionaris PKS sebagai partai dakwah Islam melihat memilih pemimpin non muslim dinegara mayoritas muslim?
2. Bagaimana pengaruh pandangan memilih pimpinan non muslim pada eksistensi partai PKS?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif para fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung dalam memilih pemimpin non muslim di negara mayoritas muslim.
2. Untuk mengetahui pengaruh pada eksistensi DPD PKS Kota Bandar Lampung dan pandangan partai PKS dalam memilih pemimpin non muslim dinegara mayoritas muslim.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

Manfaat penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah:

1. Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah menambah ilmu dan wawasan pengetahuan pada jurusan yang diambil oleh peneliti (pemikiran politik islam) khusus nya tentang prespektif para fungsionaris partai PKS terhadap memilih pemimpin non muslim.
2. Meningkatkan partisipasi dalam mengemban bacaan atau artikel dan sebagaimana menjadi sarana penetapan pengetahuan yang berupa teori yang telah dipelajari.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang tepat untuk melaksanakan suatu penelitian dengan memanfaatkan pemikiran selaku seksama agar mampu menggapai tujuan metode penelitian amat terpaat dengan masalah dan sifat penelitian,¹³ sebelum penulis mengutarakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, sebaiknya kita memahami peristiwa yang berkaitan dengan menggunakan metode tersebut.

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik pada suatu penelitian ilmiah diperlukan metode yang berkontributif dapat dilihat pada macam penelitiannya, tergolong macam penelitian lapangan (*field research*) dengan maksud penelitian yang dikerjakan dengan mengambil data yang terdapat pada lapangan penelitian, penelitian lapangan dikerjakan dengan keadaan kehidupan yang sesungguhnya, penelitian lapangan pada kenyataannya yaitu metode untuk mengetahui secara khusus dan realitas secara fakta pada sesuatu pada kehidupan bermasyarakat, penelitian lapangan memiliki tujuan untuk memecahkan berbagai masalah praktis pada realita hidup keseharian tetapi juga mengangkat realita tersebut secara apa adanya kemudian menginterpretasikan data yang di peroleh berdasarkan referensi yang relevan.¹⁴

¹³ *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017/2018), h. 4.

¹⁴ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

2. Sifat Penelitian

Terlihat pada sifat penelitian, penelitian yang dikerjakan pada dasarnya berupa penelitian secara deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki¹⁵ dalam hal ini peneliti menyampaikan segalanya yang berkaitan kepada Memilih Pemimpin Non Muslim Negara Mayoritas Muslim (Prespektif Partai PKS Kota Bandar Lampung).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah study lapangan (*field research*), merupakan cara pendekatan dengan upaya terjun secara langsung ke lapangan, dan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data penelitian yang didapatkan dengan langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara, sumber penelitian primer didapatkan para peneliti untuk dapat menjawab hal yang dinyatakan oleh peneliti dalam penelitiannya, data primer merupakan opini subyek (orang) dengan cara sendiri ataupun kelompok, dengan hasil observasi kepada suatu benda atau fisik, hal yang terjadi atau pekerjaan, dan hasil uji, pada penelitian ini.¹⁶

¹⁵ Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38.

¹⁶ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: 2010), h.171.

Sebuah data Primer yang diperoleh pada objek penelitian merupakan fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung melalui wawancara, obeservasi, dokumentasi atau bukti-buktu lain yang peneliti kumpulkan langsung dari responden sebagai sampel yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel yang akan dijadikan sumber wawancara, *purposive sampling* merupakan teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, dan sampel ini sangat cocok digunakan pada penelitian kualitatif. Selain itu dengan teknik *purposive sampling* kita hanya memilih beberapa sampel yang dijadikan sebagai irforman yang sekiranya sudah mampu memberikan jawaban atas informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Untuk mendapatkan data wawancara sebagai hasil, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa fungsionaris DPD PKS yaitu:

- 1) Aep Saripudin, sebagai Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung Masa Khidmad 2015-2020.
- 2) Agus Djumandi, sebagai Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung Masa Khidmad 2015-2020.
- 3) Sofyan Sauri, sebagai Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung Masa Khidmad 2015-2020.

- 4) Raden Cik Awang, sebagai Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung Masa Khidmad 2015-2020.

Judul penelitian memerlukan peran dan perspektif fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara yang dilakukan dengan fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung diharapkan mampu menjawab masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian yang memerlukan penilaian dan pandangan fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung. Sebagai sumber informasi masyarakat yang juga dibutuhkan pandangannya terhadap eksistensi PKS, maka peneliti mewawancarai sumber, sebagai berikut:

- 1) Windi Bob Putra, sebagai developer warga perumahan pramuka *garden residen*.
- 2) Doni Sagiari, sebagai pengusaha warga perumahan pramuka *garden residen*.
- 3) Wahyu Amanda, sebagai pegawai negeri sipil (PNS) warga perumahan imam bonjol.
- 4) Ibu Masnun, sebagai pegawai negeri sipil (PNS) warga perumahan imam bonjol.
- 5) Ibu Putri Emti, sebagai pengusaha warga kelurahan kaliawi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang telah ada ataupun dibagikan secara umum untuk seluruh masyarakat umum bagi instansi ataupun kelembagaan yang menggabungkan, diolah, dan disajikan. Data Sekunder merupakan data yang telah ada.¹⁷ Data sekunder merupakan data yang telah ada data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai buku, literature, berbagai karya dan dokumentasi yang terkait dengan objek penelitian.

Kedua data diatas digunakan agar dapat menyempurnakan data yang dibutuhkan oleh peneliti, dikarenakan data yang terdapat dilapangan tidak akan menjadi sempurna tanpa adanya kepustakaan. Dikarenakan mengonsumsi kedua sumber data, maka data yang telah didapatkan dapat memberi validitas dan kebenarannya yang dapat dipertanggungjawabkan data sekunder dalam penelitian ini ialah dokumentasi tentang partai PKS, dan artikel yang dijadikan referensi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Obesrvasi yaitu megamati suatu keadaan dengan cara wajar dan yang sebenarnya terhadap suatu objek tanpa ada usaha yang dipengaruhi agar memengaruhi, mengatur, memanipulasikannya, selain hal tersebut dapat juga memilah data kurang objektif yang

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2002), h.81.

berasal dari data yang telah kemukakan oleh seluruh responden dengan mengulang kembali data yang telah didapatkan melalui wawancara yang terkadang dapat dipengaruhi oleh hal seperti subjektifitas orang yang mengutarakan keterangan dengan demikian data yang didapatkan merupakan kebenaran data yang ada dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang memberikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang digunakan oleh penulis kepada fungsioner DPD partai keadilan sejahtera (PKS) yang ada di kota Bandar Lampung, wawancara yaitu bentuk komunikasi secara verbal seperti dialog dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai suatu permasalahan yang disampaikan oleh pewawancara kepada responden¹⁹ dengan hal ini penulis memanfaatkan interview dengan bebas terpimpin atau merupakan interview yang dikerjakan oleh pewawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan lengkap terperinci seperti masalah yang ingin dipecahkan oleh penulis dengan menentukan jumlah hasil wawancara yang ditentukan sesuai dengan keadaan ataupun bukti yang memiliki dampak pada objek penelitian, teknik tersebut dapat memberi peluang pada responden agar memberi jawaban atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan dengan bebas dan

¹⁸ M.Iqbal Hasan, *Ibid*, h. 85.

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.

khusus, metode wawancara pertanyaan diberikan secara lisan dengan mewawancarai peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai Memilih Pemimpin Non Muslim Di Negara Mayoritas muslim (pandangan partai PKS kota Bandar Lampung).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki suatu benda seperti buku-buku, majalah berkas peraturan sekertasis pada suatu rapat, dan catatan harian, untuk objek yang diamati agar mendapatkan informasi, dapat dipersatukan 3 macam sumber, yaitu sumber data berupa tulisan, sumber data berupa tempat (lokasi), dan sumber data berupa kertas ataupun sumber data berupa seseorang baik sebagai pelaku atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁰

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari obeservasi, wawancara dan dokumentasi sesuai pada kepentingan yang ditentukan, melangkah pada tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan dan mengolah data yang telah dikumpulkan menggunakan cara klarifikasi atas segala jawaban agar data yang sudah didapatkan mampu dianalisa sesuai dengan data lapangan, analisis ini memakai teknik analisis kualitatif yang digambarkan menggunakan kata ataupun kalimat selanjutnya dipisahkan sesuai dengan kategori agar dapat disimpulkan agar

²⁰ Cholid Nuroboko dan Ahmadi, op.cit, h. 85.

menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir secara induktif, berfikir secara induktif merupakan berasal dari fakta khusus, peristiwa khusus lalu ditarik kegeneralisasi, maka dari itu perlu diingat dengan teliti, seperti yang telah disampaikan semakin lama waktu penelitian dilapangan, maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks dan rumit, agar perlu dilakukan segera penganalisan data dengan reduksi data, mereduksi data merupakan mengambil intisari, memilih hal yang terpenting, dicari tema dan pola, dengan seperti itu data yang telah direduksikan akan memberi gambaran secara jelas, dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.²¹

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang muncul berdasarkan data dengan berwujud kata-kata dan bukan merupakan angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif yang menggambarkan setiap variabel, satu persatu dengan tujuan mengumpulkan informasi actual secara rinci dalam mengidentifikasi masalah.

Perolehan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan dalam metode deskriptif yaitu metode yang dipakai dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan analisis dan kesimpulan tersebut maka akan menjawab segala pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

²¹ Sugiyono "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D", (Bandung Penerbit Alfabeta, 2017), h. 247.

BAB II

NEGARA, KEPEMIMPINAN, DAN PARTAI POLITIK

A. Negara

1. Pengertian Negara

Negara merupakan suatu organisasi dan kekuasaan yang berdaulat dengan system pemerintahan dalam melaksanakan tata tertib suatu umat didaerah tertentu. Bagaiamanapun bentuk dan coragnya, Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan selalu memiliki tatapemerintahan. Dan tata pemerintahan selalu melaksanakan suatu tata tertib umat pada daerah tertentu.

Menurut aristoteles, Negara merupakan persekutuan dari suatu keluarga dan desa guna dapat memperoleh hidup dengan sebaik-baiknya. Menurut Hans Kelsen, Negara merupakan suatu susunan pergaulan hidup secara bersama-sama dengan tata paksa menurut Blun Tschli, Negara merupakan diri rakyat yang tersusun dalam organisasi politik pada suatu daerah tertentu.²²

Menurut Koerniatmanto S menyatakan bahwa, warga Negara merupakan anggota Negara dengan bersetatus khsus mengenai kenegarannya.²³ Menurut Sowemantri, menyatakan bahwa warga Negara merupakan hal yang berkaitan dengan kemanusiaan sebagai

²² Sahat Sitohang, *Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 1992), h. 25.

²³ *Ibid*, h. 24.

seorang pada suatu ikatan dengan terorganisir pada suatu interaksi di Negara²⁴

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik yang memiliki ragam suku, adat, budaya, dan Agama. Dengan demikian warga Negara Indonesia tidak hanya memeluk satu agama saja namun memiliki keragaman agama seperti, Hindu Kristen khatolik konghucu dan Islam. Hal tersebut biasa kita kenal dalam Agama Islam yaitu, sebagai muslim yaitu orang yang memeluk agama islam dan non muslim memeluk agama lainnya. Dalam suatu Negara memiliki seorang pemimpin yang memegang kebijakan-kebijakan dan membawa warganya kedalam keadaan yang lebih baik.

2. Fungsi Negara

Secara umum Negara memiliki empat fungsi, fungsi Negara yang paling utama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat agar terciptanya kondisi yang aman dan stabil, dalam upaya pencegahan pemberontakan-pemberontakan.

Fungsi Negara sebagai berikut :

- a. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan
- b. Fungsi Pertahanan
- c. Fungsi Menegakan Keadilan

²⁴ *Ibid*, h. 24.

3. Tujuan Negara

Secara umum, tujuan Negara dapat dilihat melalui beberapa perwujudan unsure, seperti keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai berikut :

- a. Menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.
- b. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
- c. Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin Negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan.
- d. Mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapainya tujuan Negara yang tinggi, yaitu kemakmuran bersama.
- e. Menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, penguasa yang memiliki kekuasaan dan dibatasi oleh HAM.

B. Kepemimpinan

Kepemimpinan sudah ada sejak zaman kuno, definisi kepemimpinan menurut para ahli:

- a. Menurut Lussier, Robert N. Dan Achua Christopher F. “*Leadership is the influencing process of leaders and followers to achieve organizational objectives through change*”, yaitu kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi antara pemimpin dan yang

dipimpin untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut melalui perubahan atau pembaharuan.²⁵

- b. Menurut Nanus, Burt dan Dobbs Stephen M. “ *a leader of nonprofit organization is a person who marshall the people, capital, and intellectual resources of the organization to move it in the right direction*”, yaitu seorang yang memimpin suatu organisasi yang mengatur modal, dan sumberdaya intelektual organisasi untuk menggerakannya kearah yang benar.²⁶

Inti dari sebuah kepemimpinan adalah pemimpin yang setiap organisasi atau sistem sosial yang mempunyai sebutan atau predikat yang berbeda.²⁷ Dalam kepemimpinan politik pemimpin disebut sebagai presiden, raja, ratu, perdana menteri, ketua DPR, ketua partai, dan sebagainya. Proses kepemimpinan memerlukan waktu, bukan sesuatu yang terjadi seketika, dalam proses kepemimpinan memerlukan waktu yang cukup lama tergantung pada situasi pada altar kepemimpinan, kualitas pemimpin dan anggotanya. Dalam suatu kepemimpinan dipimpin oleh seorang pemimpin.

1. Pemimpin

Pemimpin merupakan inti dari suatu kepemimpinan, dalam setiap organisasi atau system sosial seorang pemimpin mempunyai sebutan atau predikat yang berbeda dalam kepemimpinan politik pemimpin

²⁵ Wirawan, *Kepemimpinan Teori Psikologi Perilaku Organisasi Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 6.

²⁶ Wirawan, *Kepemimpinan Teori Psikologi Perilaku Organisasi Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 6.

²⁷ Inu Kencana, *Menejemen Pemerintahan*, (Bandung : Prenada Media, 2009), h. 107.

disebut sebagai presiden, raja, ratu, perdana menteri, ketua dpr, ketua partai, dan sebagainya. Pemimpin merupakan tokoh atau elit anggota system sosial yang dikenal oleh dan berupaya mempengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung.²⁸ Suksesnya suatu kepemimpinan ditentukan kualitas pemimpinnya, namun pendapat lain menyatakan bahwa dalam kesuksesan kepemimpinan pemimpin hanya memiliki pengaruh kecil dan factor pendukung besar lainnya ialah kualitas anggotanya, situasi lingkungan eksternal dan internal system sosial.

2. Fungsi Pemimpin

Seorang pemimpin memiliki beberapa fungsi tertentu yang berbeda, baik pada sistem sosial yang satu dengan yang lain:

a. Menciptakan Visi

Persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin adalah memiliki sebuah visi dan mampu menciptakan visi. Visi merupakan tujuan atau target yang harus dicapai oleh seorang pemimpin dan anggotanya.²⁹

b. Mengembangkan Budaya Organisasi

Visi seorang pemimpin hanya dapat direalisasikan jika seluruh anggota mampu berfikir, bersikap, dan berperilaku tertentu, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bergerak mencapai tujuan utama atau visi. Budaya organisasi merupakan norma, nilai,

²⁸ Wirawan, *Kepemimpinan Teori Psikologi Perilaku Organisasi Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 6.

²⁹ *Ibid*, h. 64.

asumsi, filsafat organisasi, dan sebagainya yang dikembangkan oleh pemimpin dan diterapkan oleh anggotanya.³⁰

c. Menciptakan Sinergi

Tugas penting bagi seorang pemimpin adalah mempersatukan anggota untuk mencapai tujuan bersama, karena pada dasarnya setiap anggota yang berada pada suatu organisasi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun tetap memiliki tujuan yang sama, maka seorang pemimpin diharapkan mampu menggerakkan anggotanya dan menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Menciptakan Perubahan

Seorang pemimpin merupakan agen perubahan, maka untuk menjadi seorang pemimpin ia diharuskan untuk dapat menjadi seorang yang cerdas dan mampu menciptakan terobosan-terobosan terbaru menuju masa depan yang lebih baik.³¹

e. Memotivasi Anggota

Memotivasi anggota merupakan upaya yang memerlukan pemikiran sistematis mengenai keadaan anggota dan teknik motivasi yang digunakan agar dapat memberikan semangat anggota dalam mencapai tujuan bersama.³²

f. Memberdayakan Anggota

³⁰ *Ibid*, h. 68.

³¹ *Ibid*, h. 70.

³² *Ibid*, h. 73.

Menurut Rosabeth Moss Kanter, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti memberikan daya kepada orang yang beroperasi dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam suatu organisasi.³³ Dengan pemberdayaan anggota maka akan menghasilkan fenomena seperti:

- 1) Meningkatkan hasil kerja.
- 2) Memperbaiki proses kerja
- 3) Menurunkan biaya produksi dan operasi
- 4) Berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang baik.
- 5) Meningkatkan kepuasan kerja.

g. Mewakili Sistem Sosial

Sebagai seorang pemimpin harus dapat mewakili sistem sosial atau organisasi yang dipimpin, sebagai seorang pemimpin harus dapat melakukan peran interpersonal yaitu peran yang mewakili sistem sosial nya kedalam dan keluar organisasi, peran informasional yaitu peran sebagai pengumpul dan penyebar informasi atau sebagai juru bicara organisasi.³⁴

h. Manajer Konflik

Konflik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik

³³ *Ibid*, h. 74.

³⁴ *Ibid*, h. 76.

yang menghasilkan keluaran konflik.³⁵ Maka untuk menjadi seorang pemimpin harus dapat memahami berbagai konflik dan penyebabnya agar dapat memecahkan konflik.

3. Ciri-ciri Pemimpin

Pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang dapat mengikat, mendorong sumber daya organisasi dan menumbuhkan keharmonisan pada organisasi agar dapat bersaing secara baik atau bisa disebut gaya pemimpin. Menurut Maxwell dalam memberikan pandangan pada seorang pemimpin, pemimpin yang baik harus memiliki ciri³⁶:

- a. Dapat menciptakan lingkungan yang tepat seperti memperhatikan anggota atau bawasanya.
- b. Mengetahui kebutuhan anggotanya.
- c. Dapat mengendalikan keuangan, personalia, dan perencanaan.
- d. Dapat menghindari dosa yang mematikan :
 - 1) Berusaha disegani bukan di hormati.
 - 2) Tidak meminta nasehat dan bantuan orang lain.
 - 3) Tidak memperdulikan bakat pribadi namun menekankan peraturan bukan keahlian.
- e. Tidak menerima keritik namun tetap konstruktif.
- f. Tidak mengembangkan rasa tanggungjawab dalam diri orang lain.
- g. Memperlakukan setiap anggota dengan cara yang sama.

³⁵ *Ibid*, h. 79.

³⁶ Madani, "Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin". Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, vol.10 no2 (2018), h. 17.

h. Tidak membuat orang selalu mendapatkan informasi.

4. Tipe Pemimpin

Sebagai seorang pemimpin tentunya memiliki tipe yang berbeda, berikut merupakan macam-macam tipe seorang pemimpin:

a. Tipe Karismatis

Tipe karismatis pada seorang pemimpin memiliki kekuatan energi, daya tarik dan wibawa yang luar biasa sehingga dapat mempengaruhi orang lain dan mampu mempunyai anggota yang besar jumlahnya dan pengawal yang dapat dipercaya.³⁷

b. Tipe Paternalistis

Tipe paternalistis yaitu tipe kepemimpinan yang ke bapakan,³⁸ dengan sifat sebagai berikut:

- 1) Dia menganggap anggota nya sebagai manusia yang belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.
- 2) Dia bersikap terlalu melindungi.
- 3) Jarang memberikan kesempatan kepada anggota nya untuk mengambil keputusan sendiri.
- 4) Dia hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada anggota nya untuk berinisiatif.

³⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 81.

³⁸ *Ibid*, h. 81.

- 5) Dia tidak memberikan atau hamper tidak pernah memberikan kesempatan anggota nya untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri
- 6) Selalu bersikap maha benar.

c. Tipe Militeristis

Adapun sifat pemimpin yang militeristis³⁹ antara lain:

- 1) Lebih banyak menggunakan sistem kekerasan yang sangat otoriter kaku dan sering kali kurang bijaksana.
- 2) Menghendaki kepatuhan secara mutlak dari anggota nya.
- 3) Sangat menyukai formalitas secara berlebihan.
- 4) Memnuntut ada nya disiplin yang keras.
- 5) Tidak menghendaki saran, keritikan dan sugesti anggota nya.
- 6) Komunikasi hanya berlangsung seara saja.

d. Tipe Otokratis

Kepemimpinan otokratis kepemimpinan yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang harus dipatuhi.⁴⁰

e. Tipe Laissez Faire

Tipe laissez faire merupakan tipe kepemimpinan yang membiarkan anggota nya untuk berbuat semau nya, dia tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bias mengtrol anggota nya.⁴¹

f. Tipe Populistik

³⁹ *Ibid*, h. 81-82.

⁴⁰ *Ibid*, h. 83.

⁴¹ *Ibid*, h. 84.

Tipe populistis merupakan tipe seorang pemimpin yang berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, juga kurang mempercayai dukungan kekuasaan serta bantuan hutang-hutang luar negeri.⁴²

g. Tipe Administratif atau Eksekutif

Tipe administratif merupakan tipe kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif, dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang efisien untuk memerintah seperti memantapkan integritas bangsa.⁴³

h. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis biasanya berlangsung dengan baik⁴⁴, seperti:

- 1) Organisasi dengan bagiannya tetap berjalan dengan baik dan lancar sekalipun pemimpin tersebut tidak ada dikantor.
- 2) Setiap anggotanya sadar akan tugas dan kewajibannya, sehingga memberikan tingkat kepuasan tersendiri atas pencapaian target.
- 3) Mengutamakan kesejahteraan dan kelancaran kerja sama pada setiap anggota.
- 4) Pemimpin demokratis berfungsi sebagai *katalisator* untuk mempercepat dinamisme dan kerja sama, untuk mencapai

⁴² *Ibid*, h. 85.

⁴³ *Ibid*, h. 85.

⁴⁴ *Ibid*, h. 86.

tujuan bersama dengan menggunakan cara yang paling cocok dengan jiwa anggotanya.

C. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Maurice Duverger menyatakan bahwa partai berasal dari bahasa latin *pars*, artinya “bagian”. Dapat kita pahami bahwa ia merupakan suatu bagian maka dari itu memiliki konsekuensi yang pasti pada bagian-bagian lain. Maka dari itu untuk dapat memenuhi pengertian tersebut dengan idealnya tidak dimungkinkan disuatu Negara jika hanya memiliki satu partai.⁴⁵

Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa partai berasal dari bahas Inggris *part*, artinya merupakan suatu bagian atau golongan kata partai menunjukan pada suatu golongan dengan penglompokan masyarakat yang didasarkan pada kesamaan tertentu meliputi suatu tujuan, ideologi yang dimiliki, Agama bahkan suatu kepentingan. Pada kelompokan tersebut terbentuk suatu organisasi secara umum, dan dibedakan berdsarkan suatu wilaya aktifitasnya, seperti suatu organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan organisasi politik. Berdasarkan perkembangannya,

⁴⁵ Muhammad Labodo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori Konsep Dan Isu Strategis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 11.

partai lebih terasosiasi untuk suatu organisasi politik atau organisasi masyarakat yang digerakan dibidang poltik.⁴⁶

Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis*, artinya kota ataupun komunitas secara keseluruhan. Konsep mengenai *polis* merupakan peroyek idealis ilmuwan Plato (428 sampai 328 s.m) dan ilmuwan Aristoteles (384 sampai 322 s.m).⁴⁷ Plato memiliki tujuan untuk membuat suatu pemahaman dengan konsep *polis* yaitu dapat menciptakan masyarakat yang ideal. Dengan demikian politik merupakan suatu usaha dan suatu aktivitas untuk mewujudkan dan membangun masyarakat yang ideal atau lebih baik. Dan Aristoteles menyatakan bahwa suatu aktifitas politik tidak diciptakan oleh manusia namun ditemukan dengan cara alamia dalam diri setiap manusia.⁴⁸

Partai politik ialah bagian dari infrastruktur politik dalam Negara. Agar dapat memahaminya beberapa ahli menyatakan pendapat mengenai suatu pengertian dari partai poltik. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai poltik ialah kelompok yang terorganisir dengan anggota-anggotanya yang memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita serta tujuan yang sama.

Tujuan suatu kelompok yaitu memperoleh kekuasaan politik dan dapat menduduki kedudukan politik dengan yang konstitusional, agar

⁴⁶ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelomok-kelompok Penekan*, Judul Asli: Party Politics and Pressure Groups A Comparative Introduction, Penerjemah: Laila Hasyim, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984), h. 4.

⁴⁷ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2011), h. 49.

⁴⁸ Muhadam Labolo, Tegu Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 10.

dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan.⁴⁹ Robert K. Carr, partai politik merupakan organisasi dengan usaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintahan.⁵⁰ Partai politik mempunyai 3 prinsip dasar, partai sebagai koalisi, paratai sebagai organisasi, dan partai sebagai pembuat kebijakan. Teori partai politik digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini, peneliti menjadikan PKS sebagai objek penelitian yang juga merupakan salah satu Partai Politik Dakwah Islam di Indonesia.

PKS berasal dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas yang ada di Indonesia pada tahun 1980-an, gerakan tersebut dipelopori oleh Muhammad Natsir atau mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi yang telah dibubarkan pada tahun 1960 dan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Partai dakwah yang dirintis oleh gerakan kampus ini sukses menjadi “kuda hitam” dalam setiap pemilu di era reformasi. Merebut empat besar pada pemilu 2009 menjadikan PKS sebagai partai Islam terbesar meninggalkan partai Islam lainnya. Banyak yang menyamakan gerakan PKS dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, h. 11.

⁵⁰ *Ibid*, h. 12..

⁵¹ Yugha, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2014), h. 66.

2. Fungsionaris

Fungsionaris merupakan pejabat, pegawai, atau anggota pengurus yang menduduki fungsi⁵² dalam suatu organisasi baik secara umum ataupun organisasi politik. Fungsionaris terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan staf-staf lain pada setiap bidang sesuai dengan fungsinya. Pada penelitian ini fungsionaris merupakan objek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi dan pendapat untuk menjawab masalah penelitian. Dan fungsionaris terkait ialah fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan yang diselenggarakan untuk memilih seseorang agar dapat mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan yang dimaksud ialah, presiden (eksekutif), wakil rakyat (legislatif), dan berbagai pemerintah tingkat lainnya. Dalam pemilihan umum memiliki suatu tujuan, sebagai berikut :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

⁵² Suharto, Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Penerbit Indah, 2004), h. 87.

4. Memilih Pemimpin Dalam Islam

Pemimpin dalam Islam yaitu, suatu usaha menyerukan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada manusia,⁵³ yaitu agar manusia melakukan hal yang menuju kepada kebaikan dan mencegah kepada hal keburukan. Dalam Islam kepemimpinan yaitu suatu wujud dari amal shaleh dan keimanan. Oleh sebab itu seorang pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, kelompok, keluarganya dan kedudukan dengan tujuan untuk harta bukanlah pemimpin yang sesuai dengan Islam yang sesungguhnya meskipun pemimpin tersebut memeluk agama Islam.

Menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya yaitu *Muqaddimah* secara kontekstual hadis tersebut dapat dipahami bahwa hak seorang pemimpin bukan hanya kepada etnis Quraisy saja, melainkan kepada kewibawaan dan kemampuannya saja, melainkan pada masa Nabi seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin ialah memimpin dan dipatuhi oleh umatnya dan yang dipimpinnya adalah dari kalangan Quraisy. Demikian apabila terdapat seorang yang mampu memimpin dan memiliki jiwa kewibawaan namun bukan dari suku Quraisy, maka dapat ditetapkan untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala Negara.⁵⁴

⁵³ Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 8.

⁵⁴ Muhadi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 34.

Menurut Imam Al-Haramain, syarat-syarat untuk menjadi seorang imam haruslah ia dari *ijtihad* sehingga ia tidak perlu meminta suatu fatwa dari oranglain dalam berbagai suatu peristiwa.⁵⁵ Kemudian telah disepakati bahwa tugas seorang pemimpin atau imam ialah melaksanakan segala urusan dan mnegutamakan kemaslahatan dalam mengawasi serta diharuskan memiliki keberanian dalam suatu persiapan bala tentara. Mampu menghilangkan perbedaan-perbedaan dalam artian seorang pemimpin haruslah mampu mempersatukan umatnya dan juga memiliki kebijaksanaan dalam menilai umatnya. Untuk menjadi seorang pemimpin hendaklah tidak dikekang oleh kepentingan pribadi dan tidak lemah dalam melakukan tindakan harus tegas serta mampu memberikan hukuman dengan semestinya.⁵⁶

Menurut Zaidiyah, keberadaan seorang imam ialah wajib begitu pula dengan pendapat para berbagai fiqrah Syi'ah. Namun, artian seorang imamah berdasarkan pendapat mereka dan pendapat jumhur umat Islam berbeda. Yang terdekat antara fiqrah Syi'ah dengan jumhur umat Islam yaitu Syi'ah Zaidiyah atau pengikut dari Zaid bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Husein sebagian dari fiqrah Syi'ah berpendapat bahwa seorang imamah diharuskan berada dalam suatu ruang lingkup keturunan Husein. Dan menurut mereka juga seseorang yang alim, memiliki jiwa pemberani dan

⁵⁵ Amir Abyar dan Zainal mutaqin, *Kepemimpinan Dalam Islam*, (Jakarta: Press, 2010), h. 17.

⁵⁶ *Ibid*, h. 39.

dermawan dari keturunan Fatimah berhak menjadi seorang imam dan harus ditaati.

Mereka mengizinkan dengan diperbolehkan adanya dua seorang pemimpin pada dua daerah jika diantara mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Dimasa pemerintahan Hisyam bin Abdulmalik, mereka mengangkat Zaid bin Ali sebagai Hisyam bin Abdulmalik, dan mereka menjadikan Zaid bin Ali sebagai imam. Dan Imam Zaid menyampaikan pendapat bahwa orang yang utama boleh menjadi seorang imam meskipun terdapat yang lebih utama, dan Ia berkata bahwa “Sahabat yang paling utama adalah Ali bin Thalib”.⁵⁷

a. Kategori Pemimpin Dalam Islam

Dalam katagori kepemimpinan seorang pemimpin memiliki dua istilah. Istilah yang pertama yaitu *imamah*,⁵⁸ seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Fuqran ayat ke-74 yaitu:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya :

*“Dan orang-orang yang berkata:”Ya Tuhan kami, anugrahanlah kepada kami isteri-isteri kami dan krturunan kami sebagai penyayang hati (kami), dan jadikanlah kami imam (pemimpin) bagi orang-orang yang bertakwa”.*⁵⁹

⁵⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2000), h. 14.

⁵⁸ Mufti Muslim, *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 37.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 366.

Dalam istilah yang kedua seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam suatu pandangan berdasarkan etimologi, pemimpin yang memiliki makna sebagai *khalifah* (pemimpin)⁶⁰. Seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi, mereka berkata: mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) dibumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Tuhan berfirman sesungguhnya: Aku mengetahui sesungguhnya apa yang tidak kamu ketahui.”*⁶¹

Sesuai dengan penjelasan kedua ayat diatas dapat dipahami bahwa memilih seorang pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Kepemimpinan merupakan suatu amanah dan tanggungjawab yang amat besar dikarenakan hal tersebut bukanlah hanya sebatas urusan didunia namun akan dipertanggungjawabkan pula diakhirat, pada umumnya masyarakat zaman dahulu enggan untuk dijadikan seorang pemimpin karena memiliki beban dan tanggungjawab yang harus ditanggungkan,

⁶⁰ Ridwan Yahya, *Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), h. 62.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 6.

meskipun akhirnya mereka mau menerima penawaran tersebut namun mereka merasa seperti menerima suatu musibah. Seperti yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Shad ayat ke-26 yaitu:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

*“Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi. Maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan dalil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena is akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”.*⁶²

Sebagaimana dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Daud a.s, untuk menjadi seorang khalifah, untuk menjadi seorang hakim diantara manusia, dikarenakan beliau memiliki kekuasaan, dan manusia wajib mendengarkan serta menaatinya. Serta kemudian Allah memberikan penjelasan kepada Nabi Daud a.s mengenai kaidah-kaidah suatu hukum agar diajarkan kepada manusia.⁶³ Yang pertama ialah, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil. Yang dapat dimaknai seperti hukumilah manusia secara adil seperti berdirinya bumi dan langit. Hal

⁶² Ibid, h.454 .

⁶³ Syarif, Munjar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqih Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga,2008), h. 33.

tersebut merupakan suatu kaidah yang utama dan penting dalam penegakan suatu hukum.

Kedua, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, dapat diartikan bahwa sebagai seorang pemimpin janganlah mengikuti hawa nafsu dalam memberikan suatu keputusan atau perkara, atau dikarenakan adanya kepentingan pribadi ketika sedang menegakan hukum, dikarenakan hal tersebut dapat menjadikan kita sebagai orang yang dzalim serta membawa kita kepada jalan yang sesat.

b. Syarat Pemimpin Dalam Islam

Syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin menurut Imam Al-Mawardi⁶⁴, adalah:

- 1) Adil (al-‘adalah), yaitu sifat yang fundamental tanpa adanya al-‘adalah seorang pemimpin dapat dikatakan tidak ideal.
- 2) Berpengetahuan luas (al-‘alim), untuk menjadi seorang pemimpin sangat dibutuhkannya ilmu dan pengetahuan yang luas untuk menopang suatu Negara dalam berjihad dan berjihad. Dalam pengambilan suatu keputusan ijtihad seorang pemimpin sangat dibutuhkan.
- 3) Dalam keadaan memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat yang baik dan sempurna. Sehingga seorang pemimpin mampu mengenali sebuah masalah

⁶⁴ Ernita Dewi, *Mengapa Kriteria Pemimpin Ideal*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), h. 45.

dengan baik dan teliti serta dapat mengatasinya dengan baik.

- 4) Sehat secara jasmani dan rohani.
- 5) Memiliki wawasan dan kearifan yang mencukupi agar mampu mengatur kehidupan dan kepentingan rakyatnya.
- 6) Mempunyai keberanian yang baik dalam melindungi wilayah Islam dan rakyatnya dari segala ancaman serangan musuh.
- 7) Merupakan keturunan Quraisy.

Menurut Al Ghazali seorang pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan mulia.⁶⁵ Oleh karenanya seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh seorang pemimpin dimana batas dan kadar atas kekuasaan serta mampu menyadari kemungkinan.
- 2) Dalam keadaan kekuasaan yang buruh seorang pemimpin harus segera melakukan evaluasi.
- 3) Mampu menerima nasehat para ulama, seorang pemimpin disarankan bisa bergaul dengan para ulama agar mampu menerima nasehat mereka, namun seorang pemimpin juga

⁶⁵ Al Gazali, *Etika Berkuasa Nasehat-nasehat Imam Al-Ghazali*, terj. Arif D. Iskandar dari *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Mulk*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1998), h. 23.

harus waspada terhadap seorang ulama yang culas yang dimana hanya mementingkan kekayaan didunia.

- 4) Mampu berlaku baik kepada seluruh bawahannya, secara garis besar seorang pemimpin harus bisa menegakan keadilan dalam mengatur dan mengarahkan pegawainya.
- 5) Seorang pemimpin tidak mengalahkan agama dan rasionalitasnya, tidak tunduk terhadap emosi serta amarahnya.
- 6) Penyantun dan rendah hati, seorang pemimpin hendaknya jauh dari sifat takabur.
- 7) Tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri melainkan mengutamakan kepentingan rakyatnya.
- 8) Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya.
- 9) Memiliki sifat yang sederhana, seorang pemimpin harus mampu mengendalikan hawa nafsunya dalam bermewah-mewahan. Dan harus bersifat qonaah menerima apa adanya dalam hal apapun, karena tidak akan ada keadilan tanpa adanya sifat qonaah.
- 10) Bijaksana, lemah lembut namun memiliki ketegasan.
- 11) Mencintai rakyatnya, hendaklah seorang pemimpin mampu membuat senang rakyatnya sesuai dengan kehendak agama.

Memiliki rasa tulus dan ikhlas dalam melaksanakan amanah yang telah diemban.

5. Eksistensi

a. Pengertian Eksistensi

Eksistensi berasal dari bahasa latin *existere* yang memiliki arti muncul, timbul, atau memilih keberadaan actual. Soren Kirkegaard merupakan tokoh eksistensialisme yang memperkenalkan “eksistensi” diabad ke 20, menurut Soren Kirkegaard eksistensi merupakan suatu keputusan yang dipilih oleh manusia dalam menentukan hidupnya, dengan menerima konsekuensi atas keputusan yang telah dipilih. Jika seseorang tidak berani melakukan tindakan tersebut maka dapat dikatakan tidak bereksistensi yang sebenarnya.⁶⁶

b. Ciri-ciri Eksistensi

Ciri-ciri eksistensialisme, ialah:

- 1) Motif pokok, yaitu cara seseorang dengan keberadaannya hanyalah dengan seseorang yang bereksistensi. Eksistensi yang dimaksud merupakan cara yang khas dalam keberadaan seseorang dan pusat perhatian yang ada pada orang tersebut, karena hal itu memiliki sifat yang humanistic.

⁶⁶ Lorens Baguss, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 185.

- 2) Seseorang yang bereksistensi harus dimaknai secara dinamis, dimana bereksistensi memiliki makna yang mampu menciptakan dirinya sendiri dengan aktif.
- 3) Dalam suatu filsafat eksistensialisme seseorang dipandang sebagai keterbukaan, yang artinya seseorang dengan realitas yang belum terselesaikan dan terus dibentuk.
- 4) Dalam filsafat tersebut eksistensialisme mampu memberikan tekanan terhadap pengalaman yang konkret, atau pengalaman secara eksistensial.

Eksistensi memiliki ciri yang sangat khas menjadi 3 tahap, yaitu:⁶⁷

1) Tahap Estetis

Tahap estetis merupakan tahap dimana suatu keputusan menjadi situasi batas dimana batas dari eksistensi yang merupakan suatu ciri khas. Dalam tahap ini biasanya seseorang memiliki pengalaman emosi dan sensual dalam ruangan yang terbuka.

2) Tahap Etis

Tahap etis merupakan tahap yang lebih tinggi satu tingkatan dari tahap estetis dikarenakan tahap estetis dapat berakhir dengan keputusan dan kekecewaan. Namun ditahap etis ini lebih menjanjikan untuk mewujudkan hidup dalam

⁶⁷ Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiaveli Sampai Nietzsche*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), h. 251.

ketenangan. Karena, dalam tahap etis ini menggunakan kaidah moral sebagai bahan pertimbangan.

3) Tahap Religious

Tahap religious merupakan tahap tertinggi, yaitu tahap dimana cara cepat menuju suatu kepercayaan yang merupakan suatu keputusan.

Eksistensi dalam penelitian ini merupakan keberadaan actual DPD PKS Kota Bandar Lampung yang dibutuhkan peneliti untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian. Eksistensi yang dimaksud berkaitan dengan eksistensi DPD PKS Kota Bandar Lampung dengan keputusan perspektif fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung dalam memilih pemimpin non muslim dinegara mayoritas muslim.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya agar mencegah terjadi pengulangan pada hasil penelitian yang menjelaskan masalah yang serupa dari seorang peneliti baik pada bentuk buku atau pada bentuk karya tulis lainnya, dengan demikian peneliti akan menjelaskan suatu karya tulisan ilmiah, diantaranya yaitu yang membahas tentang Memilih Pemimpin Non Muslim Di Negara Mayoritas Muslim (Perspektif Partai DPD PKS Kota Bandar Lampung), pernah di tulis dalam penelitian merupakan sebagian atas penelitian ataupun karya tulis sebagai beberapa tulisan, meliputi:

Mujar Ibnu Syarif⁶⁸ dengan karya ilmiah berjudul **“Memilih Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam”** yang menjelaskan tentang perspektif memilih pemimpin yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Fiqih.

Mary Silvita⁶⁹ dengan karya ilmiah yang berjudul **“Memilih Presdiden Non Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim”** pada jurnal ini menjelaskan perspektif memilih presiden dari berbagai tokoh-tokoh dalam perspektif modern tentang konsep *Ahl al-Dhimmah*.

Reza Surya Pranata⁷⁰ Dengan skripsi berjudul **“Memilih Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Masyarakat desa Kandangan Kecamatan Pematang Bandar (Analisis Pilkada Kabupaten Simalunggun tahun 2010-2015)”** dengan hasil penelitian bahwa disalah satu desa dengan mayoritas masyarakatnya adalah seorang muslim yaitu desa kandang kecamatan pematang bandar kabupaten simalunggun yang memilih pemimpin non muslim dikaji dengan hukum islam.

Muhammad Ali Zaki⁷¹. Dengan skripsi berjudul **“Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Nahdatul Ulama DKI Jakarta” (Studi Kasus Gubernur Non Muslim di DKI Jakarta)** dengan hasil penelitian

⁶⁸ Mujar Ibnu Syarif, “Memilih Presiden NON-Muslim Di Negara Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Konsitusi, vol.1 no1 (November 2008), h.92.

⁶⁹ Mary Silvita, “Presiden NON-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim” Jurnal Vol.7, No1 (September 2012), h 45.

⁷⁰ Reza Surya Pranata, skripsi, “Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Pematang Bandar (analisis pilkada kabupaten simalunggun tahun 2010-2015)”, (Medan: Universitas Islam Negri Sumatra Utara, 2018). hal. IV.

⁷¹ Muhammad Ali Zaki, skripsi, “Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (Studi kasus gubernur non-muslim di DKI Jakarta)”, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). hal. IV.

ini bahwa pimpinan wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menolak pemimpin non muslim dengan hasil putusan Mukhtamar Lirboyo 1999, sedikit pendapat yang memperbolehkan memilih pemimpin non muslim beralasan bahwa dalam Pilkada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta merupakan Pemilihan Pemimpin dilihat kinerja yang baik dan integralistik tanpa melihat latar belakang agama.



BAB III

PROFIL DPD PKS KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah Partai Keadilan Sosial (PKS) Kota Bandar Lampung

Partai keadilan sejahtera (PKS) didirikan pada 20 april 1998 yang sebelumnya dinamakan Partai Keadilan (PK) yang merupakan sebuah partai politik dengan berbasis islam dan memiliki perwakilan diparlemen Indonesia. Ditahun 2019 partai PKS telah mengikuti pemilu yang ke-5. Lahirnya PKS berkaitan dengan gerakan Islam berbasis masa kampus dan cendikiawan yang muncul menanggapi tekanan politik pemertintah Orde Baru terhadap umat Islam latar belakang pendiri PKS merupakan sebagian besar anak muda yang terdidik, PKS memiliki dukungan terbanyak diperkotaan pada pemilu 2004, PKS mendapatkan 7,3% dukungan pada suara nasional dari pada perolehan suara pemilu sebelumnya hanya 1,36%.

Partai ini secara rutin PKS terlibat pada program pelayanan social pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan. Dengan menggunakan system kaderisasi yang teratur, PKS membentuk militansi kadernya. Setelah ditelusuri PKS berasal dari gerakan dakwah kampus yang menyebar diuniversitas yang ada di Indonesi pada tahun 1980-an, gerakan tersebut dipelopori oleh Muhammad Natsir atau mantan Perdana Mentri Indonesia dari Masyumi yang telah dibubarkan pada tahun 1960 dan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Pada tahun 1985 rezim orde baru mewajibkan seluru organisasi masa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Pada tahun 1998, KAMMI

merupakan organisasi yang paling vocal menyuarakan tuntutan reformasi pada masa Soeharto dipimpin oleh Fahri Hamzah.

PKS mewajibkan kader nya untuk terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut *marhalah*. Pada pelatihan ini merupakan proses pembelajaran (*tak'lim*), pelatihan keorganisasian (*tandzim*), pembinaan karkter (*taqwin*) dan evaluasi (*taqwim*). Setiap anggota PKS harus mengucapkan *baiat* secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat. Secara Internasional kader PKS diluar negeri tercatat sebanyak 7000 orang dan 22 Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) yang tersebar di 22 negara.⁷² Sejak partai keadilan (PK) tidak lolos electoral threshold, maka partai keadilan menggabungkan diri nya dengan partai keadilan sejahtera (PKS). Kebijakan penggabungan ini secara resmi diputuskan dalam musawarah nasional istimewa partai keadilan pada tanggal 18 april 2003 bertepatan dengan tanggal 16 safar 1424 H dibekasi jawa barat.

Partai dakwah yang dirintis oleh gerakan kampus ini sukses menjadi “kuda hitam” dalam setiap pemilu di era reformasi. Merebut empat besar pada pemilu 2009 menjadikan PKS sebagai partai Islam terbesar meninggalkan partai Islam lainnya. Banyak yang menyamakan gerakan PKS dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir.⁷³

⁷² Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (On-line), tersedia di: <http://pks.id> (3 Juli 2019)

⁷³ Yugha, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2014), h. 66.

1. Profil DPD PKS Kota Bandar Lampung

Sebagai konsekuensi penggabungan ditingkat pusat, maka dibentuklah kepengurusan ditingkat provinsi dan kota dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	:Ir. Hantoni Hasan
Sekretaris	:Fahmi Samsita, S.H, Sp. Not
Bendahara	:Agus Kurniawan, ST
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	:Heri Mulyadi, S.Sos
Ketua Bidang Kaderisasi	:Ir. Abu Faris, M.Si
Ketua Deputy Pemulihan Peremouan	:Dra. Sri Puji Astuti

Pada tanggal 27-28 Mei 2006 diadakan musyawarah daerah DPD PKS Kota Bandar Lampung yang ke-2 dengan komposisi struktur:

Ketua Umum DPD	:Yusuf Efendi, SE
Sekretaris Umum DPD	:Fahmi Sasmita, S.H, Sp. Not
Bendahara Umum DPD	:Nanda Hendrawan, SE
Ketua MPD	:Syarif Hidayat, SE
Ketua DSD	:Abu Imaduddin

Musyawarah daerah DPD PKS Kota Bandar Lampung ke-3 diadakan 5 Desember 2015 dengan hasil terpilihnya struktur baru yaitu:

Ketua Umum DPD	:Syarif Hidayat, ST
Wakil Ketua Umum	:Nandang Hendrawan, SE
Sekretaris Umum	:Agus Djumandi, A.Md.
Bendahara Umum	:Grafieldy Mamesah, S.Si
Ketua Bidang Kaderisasi	:Suprpto, A.Md.

Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi struktur tersebut diubah dengan diturunkannya SK DPW Nomor 40/SKEP/AH-
PKS/1433 tanggal 6 Juli 2012,



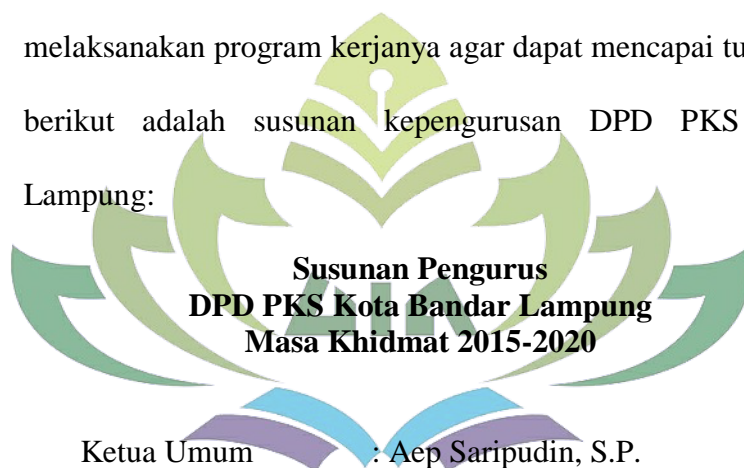
Ketua Umum DPD	:Syarif Hidayat, ST
Wakil Ketua Umum	:Suprpto, A.Md.
Sekretaris Umum	:Agus Djumandi, A.Md.
Bendahara Umum	:Nandang Hendrawan, SE
Ketua Bidang Kaderisasi	:Grafeldy Mamesah, S.Si

Kemudian setelah keluar alat kelengkapan dewan, dan Akh Syarif Hidayat menjadi ketua komisi IV DPRD Kota maka beliau mengundurkan diri dari ketua DPD untuk memfokuskan diri pada kedewanan, maka DPW mengeluarkan SK Nomor 32-SKIP-AH-
PKS/1436 tanggal 29 September 2015, dengan komposisi BPH DPD sebagai berikut :

Ketua Umum DPD	:Aep Syarifudin, SP
Wakil Ketua Umum	:Grafeldy Mamesah, S.Si
Sekretaris Umum	:Agus Djumandi, A.Md.
Bendahara Umum	:Nandang Hermawan, SE
Ketua Bidang Kaderisasi	:Suprpto, A.Md.

B. Struktur Kepengurusan PKS Kota Bandar Lampung

Suatu organisasi membutuhkan stuktur kepengurusan dalam melaksanakan program kerjanya agar dapat mencapai tujuan organisasi, berikut adalah susunan kepengurusan DPD PKS Kota Bandar Lampung:



Ketua Umum : Aep Saripudin, S.P.

Wakil Ketua Umum : H. Muchlas Ermanto Bastari, SE, MM.

Sekretaris Umum : Agus Djumandi, A.Md.

Bendahara Umum : Sofyan Sauri, S.Pd.

Bidang Kaderisasi

Ketua : Drs. Joko Mulyono, MAP.

Sekretaris : Mastini

Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi

Ketua : Nurhandoyo, S.P.

Sekretaris : Dinia Rumaini, ST.

Bidang Kepemudaan

Ketua : Muhammad Shokifu Asror

Sekretaris : Ida Fithriana, ABM

Bidang Seni dan Budaya

Ketua : Mugni Ansori

Sekretaris : Ninuk Endah Susanti, S.Pd.

Bidang Kepanduan dan Olah Raga

Ketua : Joni Warman

Sekretaris : Siti Amalina Susanti, S.Pd.

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Ketua : Yuni Karnelis, S.T.P.

Sekretaris : Yulia Elwati Ina Handayani

Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada

Ketua : Rachmadi

Sekretaris : Raden Cik Awang, S.T.

Bidang Hukum Masyarakat

Ketua : Hendro Sasongko

Sekretaris : Rofianto, S.I.Kom

Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Ketua : Meyland Robertho

Sekretaris : Suhendro Prihandono, S.Ip.

Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan

Hidup

Ketua : Sutarno, S.Si.

Sekretaris : Lydia Agustina, S.Pd.

Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah

Ketua :Suprpto, A.Md.

Sekretaris : Heni Nurmaini

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua : Didi Mawardi, S.P.

Sekretaris : Masrian, S.T.

Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader

Ketua : Andi Wahyudi, RO

Sekretaris : Yeni Fitri

Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan

Ketua : Henry Yudho Pranoto

Sekretaris : Deddy Garna

1. Ideologi PKS

Ideologi berasal dari bahasa Yunani *idea* dan *logia*, *idea* meruapak sesuatu yang terdapat dalam pikiran sebagai hasil perumusan suatu pemikiran atau rencana. *Logia* merupakan ilmu pengetahuan atau teori. Dapat disimpulkan secara bahasa ideologi merupakan pengucapan atau pengutaran terhadap sesuatu yang terumus didalam pikiran.⁷⁴

Partai Keadilan Sejahtera menganut Ideologi Islam yaitu Ideologi yang berlandaskan kepada Al Qur'an dan Sunnah Al Hadist. Partai

⁷⁴ Moh Suardi, *Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 9.

Keadilan Sejahtera memiliki ciri khusus pada organisasinya yaitu, bersih, peduli, dan profesional.⁷⁵

2. Visi dan Misi PKS

Setiap organisasi baik besar atau kecil memiliki visi dan misi, visi adalah serangkaian kalimat, menyampaikan cita-cita atau tujuan suatu organisasi ataupun perusahaan dan target yang akan dicapai dimasa depan.⁷⁶ Misi adalah serangkaian kalimat, menyampaikan tujuan dan alasan eksistensi keorganisasian, yang mengandung apa yang telah tersedia pada perusahaan untuk masyarakat, baik dapat berupa produk maupun jasa.⁷⁷

Visi Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Misi Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridoi Allah Subhanahu Wata'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Tujuan dan Fungsi

Setiap organisasi memiliki tujuan dan fungsi dalam pelaksanaan keorganisasiannya, tujuan Partai Keadilan Sejahtera yaitu, terpenuhinya

⁷⁵ Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS Suara dan Syariah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), h. 33.

⁷⁶ Wibisono, *In Management Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 43.

⁷⁷ *Ibid*, h. 46.

hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota sebagai warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan fungsi sebagai :

- a. Wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik.
- b. Memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan Negara.
- c. Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Dinamika DPD PKS Kota Bandar Lampung Dalam PILKADA

1. Perspektif Fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung Dalam Memilih Pemimpin.

Penelitian ini membutuhkan pendapat dan pandangan ataupun perspektif dari fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung, dengan demikian peneliti melakukan wawancara dengan pengurus inti dan pengurus kemenangan pemilu dan pilkada berkaitan dengan penelitian ini yaitu, Memilih Pemimpin Di Negara Mayoritas Muslim. Narasumber wawancara dengan hasil pemikiran setiap narasumber yaitu:

- a. Aep Saripudin, sebagai Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung Masa Khidmad 2015-2020.

Perspektif Aep Saripudin mengenai memilih pemimpin dan memilih pemimpin non muslim, yaitu :

1) Mengenai masalah memilih pemimpin seorang pemimpin harus memiliki dasar tanggung jawab, bukan hanya sebatas tanggung jawab tetapi rasa tanggung jawab yang besar terhadap yang dipimpin, karna semua akan dipertanggung jawabkan bukan hanya didunia tetapi diakhirat akan dipertanyakan Allah SWT, dan kemudian seorang pemimpin seorang pemimpin harus pandai mengajak anggotanya atau orang-orang yang dipimpin untuk bermusyawarah agar tercapai mufakat yang baik serta menjadi seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil terhadap siapapun itu.

2) Mengenai memilih pemimpin non muslim kita sebagai seorang muslim yang taat kepada allah swt dan Al-Qur'an sudah patutnya kita mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Allah dan mentaatinya tentang seorang memilih pemimpin non muslim sebaiknya kita harus memilih pemimpin seorang muslim walaupun Negara kita adalah Negara demokrasi yang dimana semua orang berhak memilih pemimpinnya sesuai keinginan hati nurani tetapi kita sebagai muslim hendaknya memilih pemimpin yang seimam jika didaerah kita mayoritasnya adalah seorang muslim kecuali jika didaerah kita non muslim yang mayoritas boleh saja kita memilih tapi harus dilihat seperti apa pemimpinnya apakah dia bisa menjaga

kesatuan keharmonisan didalam beragama apa lebih mementingkan dirinya sendiri.

- b. Agus Djumandi, sebagai Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung Masa Khidmad 2015-2020.

Perspektif Agus Djumandi mengenai memilih pemimpin dan memilih pemimpin non muslim, yaitu:

- 1) Memilih pemimpin bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang tidak hanya yang bisa berbicara dan memerintah tetapi juga harus bisa mengajak para anggota atau yang dipimpin untuk bisa sama-sama menjalankan apa yang dicapai menjadi seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang baik karna apa dengan adanya akhlak yang baik pasti kita sebagai yang dipimpin bisa menjadi lebih baik.

- 2) Memilih pemimpin non muslim di Negara mayoritas muslim pasti menemui pro dan kontra didalam kehidupan apa lagi masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam hal memilih seorng pemimpin ada yang tidak melihat suku ras dan agama dan aja juga melihat sesuai jiwa kepemimpinannya dan berlandaskan yang seiman, tetapi kita sebagai muslim lebih dianjurkan untuk memilih pemimpin yang seiman apalagi kita tinggal didaerah yang mayoritas muslim kita harus mendahulukan pemimpin muslim kecuali dengan daerah seperti solo yang mayoritasnya non muslim boleh saja kita memilih

tetapi harus kita garis bawahi tidak membedakan antara agama satu dan yang lain.

c. Sofyan Sauri, sebagai Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung Masa Khidmad 2015-2020.

Perspektif Sofyan Sauri mengenai memilih pemimpin dan memilih pemimpin non muslim, yaitu :

1) Memilih pemimpin yang baik harus kita lihat contoh langsung dari suri tauldan kita Nabi Muhammad saw sebagai panutan kita sebagai contoh yang kita jadikan didalam kehidupan kita yang dimana menjadi seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab, dan bisa mengerti serta memahami orang-orang yang dipimpin sehingga orang yang kita pimpin dapat mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita contohkan.

2) Memilih pemimpin non muslim boleh atau tidaknya tentu kita sebagai seorang harus taat kepada ajaran kita dan ulama kita, sebagai seorang muslim hendaknya kita memilih pemimpin sesuai dengan akidah kita dan keyakinan kita selagi kita tinggal di daerah yang mayoritas muslim hendaknya kita memilih pemimpin muslim tetapi jika kita tinggal di daerah yang mayoritas muslim boleh saja kita memilih tapi dengan syarat yang kita pilih bukan pemimpin yang menindas Islam.

d. Raden Cik Awang, sebagai Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung Masa Khidmad 2015-2020.

Pemikiran Raden Cik Awang, mengenai memilih pemimpin dan memilih pemimpin non muslim, yaitu :

- 1) Memilih pemimpin tentu itu suatu ketelitian yang kita harus miliki, dalam aspek memilih pemimpin kita harus memilih pemimpin yang mana bisa membawa kita kepada kebaikan dan memberika kemaslahatan terhadap yang dipimpin, sebagai seorang pemimpin juga harus memiliki sifat jujur adil yang selalu dicontohkan oleh Rosulullah saw sema hidup nya.
- 2) Memilih pemimpin non muslim tentu itu hak bagi semua masyarakat tetapi kita sebaga muslim yang taat kepada allah swt kita harus tunduk dan patut kepada perintah nya, dan kita sebagai msulim yang taat mesti nya kita memilih pemimpin yang satu akidah dan taat kepada Allah SWT.

Wawancara yang dilakukan dengan fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung diharapkan mampu menjawab masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian yang memerlukan penilaian dan pandangan fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung.

2. Perjalanan Politik PKS

Sejak zaman orde baru yang represik, perkumpulan pendakwah yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Islam Indonesia (KAMMI), mencari peluang agar gerakan mereka dapat memasuki ranah politik yang lebih tinggi tingkatannya. Setelah orde baru tepatnya pada tanggal 20 Juli 1998 Partai Keadilan (PK) diresmikan di masjid Al Azhar Jakarta Selatan, kemudian pada tahun 1999 PK mulai ikut serta dalam PEMILU namun hanya mendapatkan suara sebesar 1,36%. Agar dapat mengikuti pemilu selanjutnya PK berubah menjadi PKS dengan selogan “bersih peduli dan profesional”, serta dengan adanya perubahan tersebut PKS berhasil meraih suara sebesar 7,34% atau setara dengan 45 kursi, dan terus mengambil langkah progresif yang maksimal.

Pembaharuan yang telah dilakukan ditahun 2004 PKS mengadakan musyawarah kerja tingkat nasional di Bali yang sama sekali dengan massa yang tidak berbasis Islam. Hal tersebut merupakan salah satu strategi PKS dalam menciptakan partai yang terbuka dan berselogan “PKS Partai Kita Semua” dan berhasil memperoleh suara 7,88%. Pada tahun 2014 PKS mengalami penurunan dalam perolehan suara menjadi 6,79%, dikarenakan tertangkapnya presiden PKS maka mempengaruhi ektabilitas PKS. Namun pada tahun 2019 citra dan eksistensi PKS mulai meningkat dengan baik dengan perolehan suara 8,21%. DPD

PKS Kota Bandar Lampung dalam dinamika perpolitikannya berada didalam posisi yang baik dan terus berkembang.



BAB IV

PERSPEKTIF DAN EKSISTENSI DPD PKS KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM

A. Perspektif Fungsionaris PKS Sebagai Partai Dakwah Islam Melihat Memilih Pemimpin Non Muslim Dinegara Mayoritas Muslim

Pada hakikatnya pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu kemampuan dan peran yang cukup besar dalam memberikan pengaruh kepada oranglain dengan kinerja dan kekuasaannya.⁷⁸ Dalam menjalankan tugas dan amanahnya seorang pemimpin dibantu oleh anggota dan rekan kerjanya, kemudian pemimpin memberikan pengaruh yang cukup besar untuk mencapai tujuan. Saat seorang pemimpin memberikan tugas kepada anggota dan rekan kerjanya pemimpin diharapkan mampu untuk memberikan arahan tujuan, agar anggotanya mampu menjalankan tugas dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan yang telah ditargetkan.

Pemerintahan dengan menggunakan sistem politik Islam sangatlah berbeda dengan pemerintahan sistem politik pada umumnya. Dalam Islam politik mempunyai arti dan makna dalam bentuk khusus, dimana pemerintahan memiliki pandangan yang sangat bijaksana dan adil dibandingkan dengan sistem politik pada umumnya. Hal tersebut belum dapat dijelaskan dengan pemerintahan politik Islam yang ada saat ini,

⁷⁸ Siagan Sondang, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 17.

dikarenakan Negara-negara dengan masyarakat mayoritas muslimnya belum menjalankan dan menerapkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh seperti yang telah diajarkan oleh sejarah Khulafaur Rasyidin dan pada masa Rasulullah Saw.

Pemerintahan dengan sistem Islam merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yang dimana pemimpin dan anggota rekan kerjanya diharapkan adalah orang-orang yang baik, mampu bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, adil, berakhlak mulia, berpengetahuan luas terlebih pada paham Islam, dan jujur, seperti sifat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Dengan sifat-sifat tersebut diharapkan seorang pemimpin mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bersih dari riba, penipuan, monopoli, dan hal lain yang diharamkan oleh Islam.

1. Perspektif Fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai seorang pemimpin.

Menurut Aep Syarifudin sebagai Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung mengenai seorang pemimpin ialah:

“Untuk menjadi seorang pemimpin itu merupakan sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi oranglain dalam hal bekerja, dimana tujuannya adalah untuk mencapai target (goal) organisasi yang telah ditentukan”.⁷⁹

Menurut Agus Djumandi, sebagai Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, seorang pemimpin, ialah:

⁷⁹Aep Saripudin, Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis , Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

“Pemimpin merupakan tokoh atau elit yang dapat memberikan pengaruh yang besar bagi anggotanya baik secara langsung dan tidak langsung, dalam suatu lembaga ataupun organisasi, tentunya untuk menjadi seorang pemimpin harus dapat mengayomi anggotanya.”⁸⁰

Menurut Sofyan Sauri, sebagai Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, mengenai seorang pemimpin, ialah:

“Seseorang yang memiliki kharismatik dalam jiwanya untuk memberikan pengaruh kepada anggotanya agar dapat mencapai tujuan organisasi sesuai dengan yang telah dicita-citakan, tentunya untuk menjadi seorang pemimpin harus dapat menjadi seorang tauladan yang baik bagi anggotanya.”⁸¹

Menurut Raden Cik Awang, sebagai Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung, seorang pemimpin, ialah:

“Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam suatu organisasi atau kelompok dimana seorang pemimpin menjadi panutan bagi anggotanya maka untuk menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan pengaruh baik serta memberikan motivasi-motivasi bagi anggotanya.”⁸²

Seorang pemimpin merupakan titik tolak ukur dalam mencapai kesuksesan bagi masyarakatnya, khususnya di Indonesia yang dimana memiliki ragam suku, adat, budaya, dan agama. Dengan keragaman tersebut maka diperlukannya seorang pemimpin dengan visi yang besar, dan cita-cita yang tinggi, selalu optimis berfikir secara positif, memiliki

⁸⁰ Agus Djumandi, Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁸¹ Sofyan Sauri, Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁸² Raden Cik Awang, Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Jl. Bumi Manti 2 No. 46 Bandar Lampung, 30 Agustus 2019.

motivasi yang tinggi, serta menatap masa depan dengan penuh keyakinan.⁸³

Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia untuk mengangkat seorang pemimpin dilakukan secara langsung, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat seperti yang kita kenal dengan pemilihan umum (PEMILU) yang dijadikan sebagai sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan cara langsung, umum, bebas, jujur dan adil atau sering kita kenal dengan “LUBERJURDIL”. Dengan pemilu inilah masyarakat dapat memilih calon pemimpin yang akan dijadikan sebagai pemimpin dan mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat, dengan harapan agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan pemimpin yang ideal.

2. Perspektif Fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai seorang pemimpin yang ideal.

Pemimpin yang ideal dalam pandangan Islam adalah pemimpin yang mencerminkan sifat-sifat Rasulullah Saw,⁸⁴ yang pertama hendaknya seorang pemimpin memiliki sifat rendah hati karena pada hakikatnya seorang pemimpin tidaklah berbeda dengan rakyatnya. Kedua, sifat terbuka mampu menerima kritik, saran, dan komentar, dimana seorang pemimpin harus mampu menanggapi aspirasi rakyatnya secara terbuka.

⁸³ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 56.

⁸⁴ Raihana Putri, *Kepemimpinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), h.152.

Ketiga, sifat jujur dan amanah yang dapat mewakili seorang pemimpin agar dipercaya rakyatnya atas seluruh amanah yang telah diberikan. Pemimpin yang amanah merupakan kunci dari suatu kemajuan dan kesejahteraan dalam kebaikan rakyat. Keempat, sifat mampu berlaku adil, Islam memposisikan keadilan sebagai sikap essensial dimana seorang pemimpin diharuskan untuk mampu memberikan pertimbangan dan memperlakukan segalanya dengan sifat seadil-adilnya dan tidak sedikitpun berpihak terhadap sesuatu dikarenakan ada kepentingan dibelakangnya.

Kelima, komitmen dalam perjuangan yang harus tetap teguh dan istiqomah dalam penegakan keadilan dan kebenaran, tidak mudah tergoda dengan kepentingan lainnya. Keenam, bersikap demokratis agar mampu membentuk masyarakat madani, selalu menerapkan musyawarah yang mufakat dalam pengambilan keputusan dan melibatkan suara rakyat didalamnya. Ketujuh, seorang pemimpin hendaknya mengabdikan kepada Allah SWT, karena hubungan pemimpin dengan Tuhannya sangatlah penting.

Seperti yang disampaikan oleh Aep Saripudin, sebagai Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung yang saat ini juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bandar Lampung mengenai pemimpin yang ideal, ialah :

“Pemimpin yang ideal adalah yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw, yang dimana kepemimpinan Rasulullah Saw tidak bisa dipisahkan dengan fungsi, kehadirannya sebagai pemimpin spiritual masyarakat. Karena prinsip dasar kepemimpinan beliau

adalah keteladanan yang dimana dalam kepemimpinannya mengutamakan uswatun hasanah pemberian contoh kepada sahabat yang dipimpin.”⁸⁵

Menurut Agus Djumandi, sebagai Sekertaris Umum DPD PKS

Kota Bandar Lampung, mengenai seorang pemimpin yang ideal, ialah:

“Seorang pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mengayomi yang dipimpin dan dapat membawa orang-orang yang dipimpinnya, serta mampu dalam mengemban amanah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan kepemimpinan tauladan kita Rosulullah Saw.”⁸⁶

Menurut Sofyan Sauri, sebagai Bendahara Umum DPD PKS Kota

Bandar Lampung, mengenai seorang pemimpin yang ideal, ialah:

“Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya dalam kondisi yang baik dalam mencapai tujuan seorang pemimpin harus mampu mengenggap prinsip keadilan dimana adil bukan berarti sama rata, namun adil sesuai dengan porsi dan kebutuhannya, tentunya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rosulullah Saw dan apa yang telah diajarkan dalam Islam.”⁸⁷

Menurut Raden Cik Awang, sebagai Sekertaris Umum Bidang

Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung, ialah:

“Pemimpin yang ideal yang memiliki sifat-sifat yang telah diajarkan Rosulullah Saw, yang mampu menjalankan amanahnya dengan baik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tidak menyimpang dari norma-norma kepemimpinan.”⁸⁸

⁸⁵ Aep Saripudin, Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁸⁶ Agus Djumandi, Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁸⁷ Sofyan Sauri, Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁸⁸ Raden Cik Awang, Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Jl. Bumi Manti 2 No. 46 Bandar Lampung, 30 Agustus 2019.

Semua sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Saw sangatlah sesuai dengan suara isi hati, dan sangat sesuai dengan martabat serta kehormatan manusia, yang sangat menjunjung tinggi pikiran dan hati manusia agar terlaksananya kepemimpinan yang sesuai dengan fungsinya.

3. Perspektif Fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai fungsi seorang pemimpin.

Menurut Aep Saripudin, sebagai Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai fungsi seorang pemimpin, ialah:

“Fungsi dari seorang pemimpin itu sendiri ialah sebagai penggerak memberikan arahan kepada anggotanya dengan visi dan misi yang dibuat, untuk mencapai target yang ingin dicapai.”⁸⁹

Lanjut Sofyan Sauri sebagai Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung yang saat ini juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, mengenai fungsi seorang pemimpin, yaitu:

“Fungsi seorang pemimpin yaitu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi yang mengisyaratkan bahwasanya pemimpin harus berada didalam situasi bukan diluar situasi. Fungsi pemimpin memiliki dua tingkatan: pertama, sebagai kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas. Kedua, kemampuan dalam dukungan sebagai fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengadilan”.⁹⁰

Menurut Agus Djumandi, sebagai Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai fungsi seorang pemimpin, ialah:

⁸⁹ Aep Saripudin, Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁹⁰ Sofyan Sauri, Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

“Seorang pemimpin memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan porsinya, dimana seorang pemimpin harus mampu mempersatukan yang dipimpin dalam mencapai tujuan bersama dengan motivasi-motivasi.”⁹¹

Lanjut Raden Cik Awang, sebagai Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai fungsi seorang pemimpin, ialah:

“Pemimpin memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat karena amanah yang terlihat kecil ternyata memiliki tanggung jawab yang besar maka seorang pemimpin hendaknya mampu mengendalikan anggotanya, mengatur dan mengontrol dengan memberikan arahan-arahan tujuan bersama agar dapat mencapai target dengan maksimal.”⁹²

Dapat kita pahami berdasarkan teori, dan pendapat yang telah disampaikan oleh fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung untuk menjadi seorang pemimpin hendaknya memiliki nilai-nilai penting seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw, dan yang paling utama adalah kita sebagai masyarakat muslim harus mampu mengenal setidaknya sedikit mengenai calon-calon pemimpin yang akan kita pilih untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki dan meneladani sifat Rasulullah Saw. Namun diberbagai Negara dengan mayoritas penduduk Islam lainnya termasuk di Indonesia Negara yang berkedaulatan rakyat dengan ragam agama yang berbeda, banyak calon pemimpin atau bahkan yang sudah menjadi seorang pemimpin yang tidak memeluk agama Islam atau non muslim.

⁹¹ Agus Djumandi, Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁹² Raden Cik Awang, Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Jl. Bumi Manti 2 No. 46 Bandar Lampung, 30 Agustus 2019.

4. Perspektif Fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai memilih seorang pemimpin non muslim.

Mengenai seorang pemimpin non muslim menjadi topik persoalan yang menjadi pusat perhatian dari kalangan pemikir Islam. Hal tersebut sudah terjadi sejak terlahirnya agama Islam sampai dengan saat ini bahkan pada zaman yang sudah modern, dan kemungkinan saja bisa berlanjut sampai zaman yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kelebihan dan kecenderungan dalam memahami ayat-ayat pada kitab suci Al-Quran. Dalam perspektif Islam non muslim diistilahkan dengan kafir, dikarenakan tidak mengimani dan tidak mempercayai ajaran Islam atau tidak memeluk agama Islam, hal tersebut mencakup kepada kaum nasrani, kaum yahudi, dan kaum yang meyakini lainnya.

Kafir dapat dimaknakan sebagai orang yang menutupi tanda keagungan dan kebesaran Allah SWT serta kebenaran yang sudah terlihat jelas dengan adanya alam semesta ini. Namun, perlu kita ingat bahwa Al-Qur'an mengaplikasikan kata kafir diberbagai bentuk dan memiliki banyak arti, utamanya adalah ingkar terhadap wujud dan ke Esaan Allah SWT.

Sementara, untuk memilih seorang pemimpin non muslim itu dilarang, karena larangan tersebut sudah dijelaskan secara nyata didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51. Kemudian juga banyak kasus yang telah dikaji dengan menggunakan kitab fiqih bahwa hukum

seorang non muslim memiliki kuasa atas urusan seorang muslim hukumnya adalah haram. Seperti haram hukumnya meminta kepada non muslim untuk menolong dalam memerangi pemberontak, atau menjadikannya sebagai eksekutor pemberi hukuman mati atau hukuman lainnya. Dan juga menjadikannya sebagai pengurus pajak atau tim pelaksana dalam kementrian pada sistem ketatanegaraan Islam klasik, serta mengurus segala urusan kaum muslimin lainnya secara umum. Meskipun ada beberapa hal yang dikecualikan dari keharaman dibidang-bidang tertentu yang memang dalam system penanganannya harus dikerjakan oleh non muslim.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah suatu elemen yang sangat penting wajib hukumnya memilih satu pemimpin (amir) yang mampu bersikap adil terhadap masyarakat agar mampu menegakan kebenaran. Sebab untuk menegakan keadilan tidak akan tercapai apabila bukan dengan kekuasaan Allah, kepada pemimpin yang taat kepada Allah.

Setelah kita pahami hukum memilih seorang pemimpin non muslim untuk menjadi pemimpin dalam perspektif Islam, DPD PKS Kota Bandar Lampung juga memiliki pandangan dan penilaian tersendiri atas memilih pemimpin non muslim di Negara mayoritas muslim, seperti yang disampaikan oleh Raden Cik Awang sebagai Sekertaris Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPD PKS Kota

Bandar Lampung yang juga saat ini sedang menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, yaitu:

“Hukum memilih pemimpin non muslim untuk memimpin masyarakat muslim berdasarkan kepemimpinan Islam klasik itu haram. Namun untuk memilih seorang pemimpin non muslim khususnya seperti kita yang berada di Indonesia dimana rakyatnya memiliki keragaman suku, adat, budaya, dan agama. Kita dapat menentukannya dengan melihat kondisi dan situasi ketika kita berada pada suatu masyarakat muslim maka kita harus memprioritaskan masyarakat muslim. Tetapi boleh saja kita memilih pemimpin non muslim ketika kita berada dikalangan masyarakat non muslim seperti Bali, dan Papua dengan syarat calon pemimpin tersebut tidak menindas dan menghina Islam.”⁹³

Lanjut Aep Saripudin sebagai Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, atas tanggapan Raden Cik Awang :

“Ya saya setuju, jadi selama masih ada seorang muslim yang mencalonkan diri sebagai pemimpin alangkah baiknya kita memilih yang muslim, karena memang pada dasarnya kita sudahtau hukumnya. Kecuali jika kita benar-benar terdesak dikondisi lingkungan yang memang mayoritas non muslim dan dikondisi tersebut pun kita juga harus paham siapa yang kita pilih apakah dia non muslim yang mengintimidasi Islam atau non muslim yang benar memang layak menjadi seorang pemimpin. Dizaman modern seperti saat ini saya rasa masyarakat tidak perlu diragukan lagi ya, karena memang masyarakat sekarang sudah cerdas dan bijak dalam menentukan pilihannya, tidak mudah tergiur dengan janji-janji manis tentunya”.⁹⁴

Berdasarkan Undang-Undang dalam memilih seorang pemimpin kita harus melibatkan urusan agama didalamnya. Karena Undang-Undang mewajibkan kita untuk mengetahui apakah calon pemimpin merupakan seorang yang bertakwa kepada Tuhan dan sesuai dengan

⁹³ Raden Cik Awang, Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis , Jl. Bumi Manti 2 No. 46 Bandar Lampung, 30 Agustus 2019.

⁹⁴ Aep Saripudin, Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis , Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

ajaran agamanya. Dengan demikian maka tentu saja seorang muslim tidak dapat mengukur ketakwaan seorang non muslim, begitupula sebaliknya.

Dapat disimpulkan bahwa didalam Undang-Undang PILKADA No 10 Tahun 2016, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak harus berasal dari golongan muslim saja karena sesuai dengan pasal 7a yang menjelaskan tentang persyaratan calon tidak disebutkan harus memeluk agama Islam atau seorang muslim, yang dijelaskan pada pasal 7a adalah bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa,⁹⁵ dan dapat diartikan untuk menjadi seorang kepala Daerah ataupun seorang pemimpin walaupun ia beragama Islam namun tidak bertakwa kepada Tuhannya maka tentu saja tidak dapat memenuhi syarat sebagai calon pemimpin. Di Indonesia berasal dari agama manapun memiliki hak politik untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin atau kepada Daerah asalkan dapat memenuhi syarat lainnya terutama sesuai dengan yang telah dijelaskan pada pasal 7a. Berdasarkan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Hukum memilih pemimpin non muslim itu diperbolehkan.

Menurut Sofyan Sauri sebagai Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, tentang diperbolehkannya memilih pemimpin non muslim sebagai pemimpin, ialah:

⁹⁵ Undang-Undang PILKADA, (Pustaka buana, 2015), h. 120.

“Ya benar sekali kita adalah warga Negara Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Negara Indonesia memiliki keragaman adat istiadat, budaya dan agama. Sehingga dalam Undang-Undang pun telah dijelaskan untuk menjadi seorang pemimpin harus Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami tidak menentang bagi non muslim yang mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin ataupun anggota legislative karena memang seluruh rakyat Indonesia memiliki hak politik yang sama ketika ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun alangkah baiknya sebagai seorang muslim tetap mendahulukan dan menyuarakan pilihannya kepada yang muslim.”⁹⁶

Lanjut Agus Djumandi sebagai Sekertaris Umum DPD PKS Kota

Bandar Lampung, tanggapan atas Sofyan Sauri :

“Dalam agama, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dunia akhirat dimana tanggung jawab atas rakyat dan Tuhannya, namun tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab seorang pemimpin tetapi juga tanggung jawab rakyat yang memilih pemimpinnya, dimana seorang rakyat memberikan amanah kepada orang yang tepat atau orang yang salah, maka cukup besar amanah seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, sebagai seorang muslim kita juga mendapatkan amanah untuk memilih seorang pemimpin maka pilihlah seorang pemimpin dengan baik yang sesuai dengan ajaran dan syariat Islam.”⁹⁷

Setelah apa yang disampaikan oleh Bendahara Umum dan Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, Sekertaris Umum Bidang Pemenangan dan Pilkada pun menyampaikan pendapatnya, yaitu:

“Sebagai partai politik Islam yang berada di Indonesia kami tidak melarang non muslim untuk mencalonkan diri sebagai calon pemimpin karena semua memiliki hak politik yang sama, namun kami lebih menyarankan kepada masyarakat untuk memilih yang seiman dan sesuai pilihan naluri hati masing-masing lebih tepatnya

⁹⁶ Sofyan Sauri, Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis , Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

⁹⁷ Agus Djumandi, Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis , Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

mengikuti suara hati. Melihat kondisi dan situasi selagi pemimpin non muslim tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak mencampuri urusan agama seperti, dibidang kementerian keagamaan itu boleh saja seperti yang telah diajarkan dalam Islam pemimpin non muslim hendaknya tidak mencampuri urusan keagaam, zakat dan lainnya yang menyangkut agama Islam itu sendiri, sangat disayangkan apabila seorang muslim lebih memilih non muslim sebagai seorang pemimpin sedangkan masih ada yang seiman yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin.”⁹⁸

Pada satu sisi mengenai pandangan dan perspektif fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung melihat memilih pemimpin non muslim di Negara mayoritas muslim dalam menentukan sikapnya DPD PKS Kota Bandar Lampung lebih merujuk kepada hukum Islam yang diterapkan yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya. Namun dalam konteks masyarakat untuk memilih seorang pemimpin itu dikembalikan kepada pribadi masyarakat sendiri, karena dalam memilih seorang pemimpin tidak boleh ada unsur paksaan karena pada dasarnya seorang pemimpin dipilih karena kinerja, komitmen, dan integritasnya bukan dari sudut pandang latar belakang agama dan kepercayaan yang dianut. Penulis melihat bahwa pengaruh gaya pemikiran Islam klasik masih sangat berperan dalam mempengaruhi pola pikir dan pandangan mayoritas fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai larangan memilih pemimpin non muslim.

Dapat disimpulkan bahwa perspektif fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung dalam memilih pemimpin non muslim di Negara

⁹⁸Raden Cik Awang, Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis , Jl. Bumi Manti 2 No. 46 Bandar Lampung, 30 Agustus 2019.

mayoritas muslim hukumnya adalah haram, lebih dianjurkan untuk memilih pemimpin yang memeluk agama Islam atau seorang muslim. Sangat miris dan disayangkan apabila seorang muslim lebih memilih non muslim untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pada dasarnya sebagai rakyat juga memiliki amanah untuk memilih pemimpin yang mampu bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

B. Pengaruh Pandangan Memilih Pemimpin Non Muslim Pada Eksistensi Partai PKS

Paradigma pemikiran dengan model integralistik masih terlihat dan memiliki pengaruh yang besar serta dipertahankan pada saat menghukumi status dalam hukum memilih pemimpin non muslim. Hal tersebut dapat kita lihat dari pernyataan fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung yang masih menilai kepada latar belakang keyakinan dan agamanya. Bukan melihat kepada nilai-nilai kebaikan serta keadilan yang diwujudkan oleh pemimpin non muslim.

Paradigma pemikiran dengan model sekuleristik dalam suatu hal kepemimpinan masih terlihat dapat mempengaruhi sebagian kecil pemikiran fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terlihat pada usaha untuk membedakan antara politik dan agama, karena dalam konteks pemilihan seorang pemimpin, masyarakat dihadapkan kepada memilih calon pemimpin sebagai kepala daerah atau anggota legislatif. Bukan untuk memilih pemimpin untuk memimpin dalam

menjalankan misi keagamaan, maka untuk memilih seorang pemimpin kembali kepada hati nurani pemilih sendiri. Namun dalam penelitian ini penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung lebih menyarankan kepada memilih pemimpin yang muslim.

Berdasarkan pandangan dan perspektif DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai pengaruh pandangannya tersebut tidaklah berpengaruh terhadap eksistensi partai PKS itu sendiri bahkan dengan pandangan tersebut partai PKS terus dalam keadaan baik, hal tersebut dikarenakan PKS berada di Negara Indonesia yang dimana mayoritas penduduknya adalah seorang muslim yang terus meningkatkan eksistensi PKS itu sendiri yang juga disertai dengan dukungan masyarakat Islam terhadap PKS untuk menjamin perpolitikan masyarakat muslim. Seperti yang disampaikan oleh Aep Syaripudin sebagai Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, bahwa :

“Eksistensi partai PKS terus membaik didalam perpolitikan yang terjadi di Indonesia tentu sebagai partai dakwah Islam dalam Negara mayoritas Islam tidak menurunkan eksistensi partai, justru malah meningkatkan eksistensinya karena dukungan kita terhadap Islam untuk berkecimpung didunia politik karena adanya dukungan masyarakat Islam terhadap PKS untuk menjamin perpolitikan masyarakat muslim.”⁹⁹

Lanjut Agus Djumandi, sebagai Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, ialah :

⁹⁹ Aep Saripudin, Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis , Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

“Keberadaan PKS dalam dunia perpolitikan tentu tidak mengurangi eksistensi partai justru memajukan suara perpolitikan PKS dengan dukungan-dukungan masyarakat muslim, dan PKS mampu berada pada posisi ke-5 tingkat Nasional.”¹⁰⁰

Sofyan Sauri, sebagai Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar

Lampung, menyatakan bahwa:

“Berbicara mengenai eksistensi tentu keberadaan PKS selalu diperhitungkan karena PKS sendiri memperoleh peningkatan suara yang cukup besar dari tiap tahunnya dan khususnya ditahun 2019 dengan pencapaian suara diposisi ke-5 tingkat Nasional.”¹⁰¹

Raden Cik Awang, sebagai Sekertaris Bidang Pemenangan dan

Pilkada, menyatakan bahwa:

“Dengan steatment dan tanggapan persepsi PKS dalam memilih seorang pemimpin non muslim sangatlah tidak mempengaruhi eksistensi PKS sebagai partai politik, justru pada saat ini PKS semakin berada diposisi yang baik, jadi intinya semua itu tidak mempengaruhi eksistensi PKS dalam dunia perpolitikan.”¹⁰²

Eksistensi PKS terus meningkat berdasarkan peningkatan suara yang diperoleh PKS, bukan hanya mengejutkan pengamat PKS dari pihak eksternal namun juga sangat mengejutkan pihak internal atas pencapaiannya sendiri. Peningkatan suara yang diperoleh PKS menggambarkan eksistensi PKS didunia perpolitikan dengan perolehan suara yang mencapai 700% dari 1,3% (1,4 juta suara) saat pemilu tahun 1999 meningkat menjadi 7,2% (8,2 juta suara) data pemilu tahun 2004.

¹⁰⁰ Agus Djumandi, Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

¹⁰¹ Sofyan Sauri, Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

¹⁰² Raden Cik Awang, Sekertaris Bidang Pemenangan dan Pilkada DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, Jl. Bumi Manti 2 No. 46 Bandar Lampung, 30 Agustus 2019.

Jumlah perolehan suara juga melebihi target perolehan suara. Dengan pencapaian tersebut banyak pihak eksternal yang memberikan apresiasi, seperti salah satu kader NU yaitu Muhammad Imdadun Rahmat pada tahun 2008 menulis buku dengan bertemakan “*Ideologi Politik PKS*” yang dimana menyebutkan bahwa PKS merupakan *the rising star* karena PKS mampu melakukan pencapaian dengan melesat dan cepat meskipun PKS tergolongkan dengan partai baru.

Keberadaan PKS dalam masyarakat juga sangat diperlukan untuk dapat memastikan nilai eksistensi nyata PKS, dengan demikian peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat mengenai PKS. Responden pertama ialah Windi Bob Putra bekerja sebagai developer, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya, PKS adalah partai politik dengan dasar keagamaan yaitu agama Islam. Yang saya ketahui tentang PKS adalah partai politik yang memang sangat cenderung menerapkan asas-asas agama dalam pelaksanaan organisasi bahkan dengan penampilan pun mereka memiliki khas tersendiri dengan penampilan budaya ketimur-timuran, sebagai masyarakat sih ya saya hanya mengenal PKS berdasarkan apa yang saya lihat. Mengenai perspektif yang PKS keluarkan saya setuju, yaa selagi masih ada seorang Islam yang berjuang menjadi seorang pemimpin apalagi kita juga seorang muslim, alangkah baiknya bila kita memilih pemimpin yang beragama Islam, atau seorang muslim. Pandangan saya mengenai perspektif tersebut, sebagai masyarakat Indonesia kan memiliki hak memilih dan berpendapat tentunya menurut saya tidak masalah selagi masih dalam hal-hal kebaikan. Mengenai eksistensi PKS sendiri yang saya ketahui dalam lingkungan saya cukup baik.”¹⁰³

¹⁰³ Windi Bob Putra, Developer, wawancara dengan penulis, Perumahan Pramuka Garden Residen Kec. Rajabasa, 06 November 2019.

Responden kedua yaitu, Bapak Doni Sagiara bekerja sebagai pengusaha. Dengan hasil wawancara, sebagai berikut:

“Ya saya tahu bahwa PKS merupakan partai politik Islam. Saya tidak terlalu memahami dunia politik, yang saya tahu bahwa PKS adalah partai politik yang lebih mencerminkan bahwa ia adalah partai politik Islam dibandingkan dengan partai politik Islam lainnya. Mengenai perspektif tersebut saya setuju, sebagai seorang muslim lebih baik memilih seorang muslim untuk menjadi pemimpin, namun tetap saja muslim yang sesuai dengan kriteria pemimpin yang amanah, baik, dan bertanggungjawab. Untuk keberadaan PKS di lingkungan saya baik bahkan untuk suara terbanyak partai dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif 17 april kemarin, PKS merupakan peraih suara tertinggi partai.”¹⁰⁴

Responden ketiga yaitu, Bapak Wahyu Amanda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan hasil wawancara, sebagai berikut:

“PKS? Ya saya tahu PKS adalah partai politik Islam. Yang saya ketahui tentang PKS tidak banyak namun PKS merupakan partai politik dengan dasar Islam yang saat ini lebih baik, menurut saya PKS sangat mengejutkan, perjalanan PKS yang saya ketahui dulunya PKS merupakan partai politik Islam yang memang baru memiliki kader dengan jumlah yang sedikit, bahkan saya kira PKS tidak mampu untuk bersaing dengan partai politik nasional lainnya. Tapi ternyata dugaan saya salah, justru saat ini PKS sudah amat berkembang dengan perolehan suara dan pencapaian kedudukan yang cukup banyak dikursi anggota legislative tentunya dapat bersaing dengan partai politik lainnya. PKS di lingkungan saya cukup baik, bahkan untuk pembangunan tempat ibadah di lingkungan saya tinggal sempat mendapatkan bantuan dana renovasi dari PKS.”¹⁰⁵

Responden keempat ialah Ibu Masnun, bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dengan hasil wawancara, sebagai berikut:

¹⁰⁴ Doni Sagiara, Pengusaha, wawancara dengan penulis, Perumahan Pramuka Garden Residen Kec. Rajabasa, 06 November 2019.

¹⁰⁵ Wahyu Amanda, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wawancara dengan penulis, Perumahan Imam Bonjol Kec. Langkapura, 06 November 2019.

“Saya tahu PKS adalah partai politik Islam. Yang saya ketahui PKS merupakan partai politik Islam yang memang dikenal sebagai partai politik dengan ciri khas kadernya yang ketimur-timuran. Berdasarkan perspektif PKS saya setuju saja si, karena memang untuk menjadi seorang pemimpin lebih baik yang memiliki pemahaman tentang Tuhan yang sama, dan mampu bertanggungjawab terhadap rakyat tentunya. Kondisi PKS dilingkungan saya tinggal baik, karena memang saya tinggal dilingkungan kader-kader PKS mereka cukup baik dan aktif dalam menghidupkan suasana dimasjid, dengan terus berdakwah berbagi ilmu dalam kebaikan disaat pengajian rutin mingguan.”¹⁰⁶

Responden kelima ialah Ibu Putri Emti, bekerja sebagai pengusaha.

Dengan hasil wawancara, sebagai berikut :

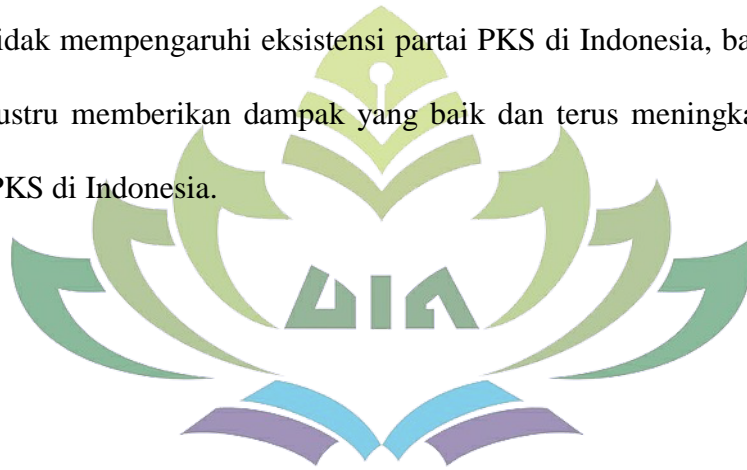
“PKS merupakan partai politik Islam. PKS adalah partai politik yang sejalan dan sependapat dengan pemikiran saya, partai politik berasaskan Islam yang juga dijadikan sebagai pedoman dalam organisasi yang tidak jauh dari Al-Qur'an dan Sunnahnya. Dalam pandangan memilih seorang pemimpin tentunya saya sangat sependapat dengan PKS walaupun kita hidup dinegara Indonesia yang beragam suku, adat, agama, dan budayanya tentu saja sebagai seorang muslim kita harus memilih pemimpin dengan latar belakang agama yang baik. Sebagai seorang muslim alangkah baiknya kita memilih seorang untuk menjadi pemimpin adalah seorang muslim yang paham agama, bertanggungjawab, dan amanah. Karena Islam adalah agama yang memiliki nilai toleransi tinggi, dibawah naungan Islam agama lain dijamin keamanannya. Namun belum tentu sebaliknya. PKS dilingkungan saya tinggal cukup baik, beberapa kader yang aktif, berdakwah berbagi ilmu dalam kebaikan dimasjid lingkungan saya tinggal. Menurut saya PKS partai politik Islam yang memang memberikan cerminan ke Islaman yang tinggi.”¹⁰⁷

Sesuai dengan teori eksistensi Soren Kirkegaard yang menyatakan bahwa eksistensi merupakan suatu keputusan yang dipilih oleh seseorang untuk menentukan hidupnya, dengan berani menanggung segala resiko

¹⁰⁶ Ibu Masnun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wawancara dengan penulis, Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, 07 November 2019.

¹⁰⁷ Ibu Putri Emti, Pengusaha, wawancara dengan penulis, Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, 07 November 2019.

atas pilihannya. Sebagai partai politik Islam PKS berani dalam mengambil keputusan mengenai pandangan memilih seorang pemimpin non muslim dinegara mayoritas muslim dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, tentu saja PKS tetap memiliki pendirian yang kuat atas pendapat dan pandangannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang juga mampu menggambarkan keberadaan PKS dalam masyarakat memberikan hasil yang positif dan baik. Pilihan dan keputusan tersebut tidaklah membuat PKS takut dan ragu karena pada hakikatnya hal tersebut tidak mempengaruhi eksistensi partai PKS di Indonesia, bahkan sejauh ini justru memberikan dampak yang baik dan terus meningkatkan eksistensi PKS di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung memilih pemimpin non muslim dinegara mayoritas muslim, PKS lebih menyerukan agar tidak memilih non muslim sebagai pemimpin, kecuali dalam kondisi dan situasi dimana kita berada dilingkungan mayoritas non muslim, misalnya seperti Bali dan Papua.
2. Dengan perspektif dan pandangan fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung mengenai memilih pemimpin non muslim tidaklah berpengaruh buruk pada eksistensi partai PKS, melainkan justru memberikan pengaruh yang baik dalam meningkatkan eksistensi partai PKS dengan dukungan masyarakat Islam di Indonesia. Sebagai masyarakat muslim hendaknya kita mampu menjadi seorang pemimpin dan memilih pemimpin dengan kriteria yang telah diajarkan sejak zaman Rosulullah Saw.

B. Rekomendasi

1. Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai memilih pemimpin non muslim di

Negara mayoritas muslim, dengan perspektif lain seperti masyarakat non muslim, dan partai atau lembaga Islam lainnya.

2. Mengingat Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam diharapkan kepada pemangku kepentingan Negara agar memperhatikan aspirasi dan pendapat umat Islam yang memiliki satu aqidah dan keyakinan, dengan hal tersebut untuk menghindari adanya gesekan dan perselisihan pada masyarakat.
3. Mengingat sistem dan mekanisme pemilihan di Negara Indonesia melalui pemilihan secara langsung, maka akan memberikan kesempatan kepada semua pihak agar dapat mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu disarankan kepada masyarakat muslim agar berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah yang secara umum memberikan larangan dalam memilih pemimpin non muslim, khususnya di Negara atau daerah dengan mayoritas penduduk muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Al Gazali, *Etika Berkuasa Nasehat-nasehat Imam Al-Ghazali*, terj. Arif D. Iskandar dari *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Mulk*, Bandung: Pustaka Hidayat, 1998.
- Amir Abyar dan Zainal Mutaqin, *Kepemimpinan Dalam Islam*, Jakarta: Press, 2010.
- Azyumardi Azra, *Minoritas non muslim dalam komunitas islam* Bandung: Angkasa, 2003.
- Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiaveli Sampai Nietzsche*, Jakarta: PT Gramedia, 2007.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Bandar Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017/2018.
- Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS Suara dan Syariah*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Danim Sudarwan, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Ernita Dewi, *Mengapa Kriteria Pemimpin Ideal*, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Esposito John L, *Islam Dan Politik*, Terj, Joesoef Sou'yb dari *islam and politics*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2011.

- Inu Kencana, *Menejemen Pemerintahan*, Bandung : Prenada Media, 2009.
- Iwan Gayo, *Buku Pintar Seri Senior*, Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2003.
- Jaelani Abdul Qodir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Jonathan Sarwono, *Strategi Melakukan Riset Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- , *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kayo Khatib Pahlawan, *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Lorens Baguss, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, Judul Asli: *Party Politics and Pressure Groups A Comparative Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.
- Muhadi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Muhammad Labodo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori Konsep Dan Isu Strategis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Rusjdi Ali, *Politik Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2000.
- Muhar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non Muslim Dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003.
- Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintah Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Raihana Putri, *Kepemimpinan Dalam Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Ridwan Yahya, *Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sahat Sitohang, *Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa*, (akarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 1992.
- Sakdiah, *Menejemen Organisasi Islam Suatu Pengantar*, Banda Aceh: Dakwah Arraniry Press, 2015.
- Siagan Sondang, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sibuea Hotma p., *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2014.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* ,Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Suharto, Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru* Surabaya: Penerbit Indah, 2004.
- Syarif, Munjar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqih Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Undang-Undang PILKADA, Pustaka buana, 2015.
- Yugha, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.

Wawancara

- Aep Syarifudin, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.
- Agus Djumandi, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.
- Sofyan Sauri, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.
- Raden Cik Awang, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Jl. Bumi Manti 2 No. 46 Bandar Lampung, 30 Agustus 2019.
- Windi Bob Putra, Developer, wawancara dengan penulis, Perumahan Pramuka Garden Residen Kec. Rajabasa, 06 November 2019.

Doni Sagiari, Pengusaha, wawancara dengan penulis, Perumahan Pramuka *Garden Residen* Kec. Rajabasa, 06 November 2019.

Wahyu Amanda, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wawancara dengan penulis, Perumahan Imam Bonjol Kec. Langkapura, 06 November 2019.

Ibu Masnun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wawancara dengan penulis, Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, 07 November 2019.

Ibu Putri Emti, Pengusaha, wawancara dengan penulis, Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, 07 November 2019.

Jurnal

Cangara Hafied, *Komunikasi Politik* Jakarta: persada, 2009. Jurnal Konstitusi Vol i, No. 1, November 2008.

Kahar Irawaty A, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perubahan Organisasi*. Jurnal Studi Perpustakaan Dan Informasi, Vol.4 no. 1, Juni 2008.

Madani, "Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin". Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.10 no. 2, 2018.

Silvita Mary, *Presiden NON-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim* Jurnal Vol.7, No1 September 2012.

Syarif Muzar Ibnu, *Memilih Presiden NON-Muslim Di Negara Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Konstitusi, vol.1 no1 November 2008.

Reza Surya Pranata, skripsi, "Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Masyarakat Desa Kandungan Kecamatan Pematang Bandar (analisis pilkada kabupaten simalunggun tahun 2010-2015)", (Medan: Universitas Islam Negri Sumatra Utara, 2018).

Muhammad Ali Zaki, skripsi, "Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Nahdlatu Ulama DKI Jakarta (Studi kasus gubernur non-muslim di DKI Jakarta)", (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Skripsi : **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tempat/Tanggal : Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

Pewawancara : Muhammad Ilham

A. Identitas Informan

1. Nama : Aep Syarifudin
2. Jabatan : Ketua Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung 2015-2020 dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Fraksi PKS 2019-2024.

B. Pendahuluan

1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya untuk kepentingan penelitian.
3. Durasi wawancara disesuaikan dengan proses wawancara dari awal sampai akhir wawancara.

4. Merekam isi pembicaraan menggunakan *audio recorder* pada *handphone*.

C. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah pemimpin yang ideal menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah fungsi seorang pemimpin yang baik terhadap rakyatnya menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
4. Bagaimana perspektif DPD PKS mengenai hukum memilih pemimpin non muslim di Negara dengan mayoritas penduduknya adalah seorang muslim?
5. Bagaimana perspektif DPD PKS mengenai masyarakat muslim yang memilih pemimpin non muslim?
6. Bagaimana pengaruh perspektif tersebut terhadap eksistensi yang dimiliki oleh PKS ?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Ucapan terimakasih.
3. Mengakhiri wawancara.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Skripsi : **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tempat/Tanggal : Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

Pewawancara : Muhammad Ilham

A. Identitas Informan

1. Nama : Agus Djumandi
2. Jabatan : Sekertaris Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung 2015-2020 dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Fraksi PKS 2019-2024.

B. Pendahuluan

1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya untuk kepentingan penelitian.
3. Durasi wawancara disesuaikan dengan proses wawancara dari awal sampai akhir wawancara.

4. Merekam isi pembicaraan menggunakan *audio recorder* pada *handphone*.

C. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah pemimpin yang ideal menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah fungsi seorang pemimpin yang baik terhadap rakyatnya menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
4. Bagaimana perspektif DPD PKS mengenai hukum memilih pemimpin non muslim di Negara dengan mayoritas penduduknya adalah seorang muslim?
5. Bagaimana perspektif DPD PKS mengenai masyarakat muslim yang memilih pemimpin non muslim?
6. Bagaimana pengaruh perspektif tersebut terhadap eksistensi yang dimiliki oleh PKS ?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Ucapan terimakasih.
3. Mengakhiri wawancara.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Skripsi : **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tempat/Tanggal : Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, 28 Agustus 2019.

Pewawancara : Muhammad Ilham

A. Identitas Informan

1. Nama : Sofyan Sauri
2. Jabatan : Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandar Lampung
2015-2020 dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Fraksi PKS
2019-2024.

B. Pendahuluan

1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya untuk kepentingan penelitian.
3. Durasi wawancara disesuaikan dengan proses wawancara dari awal sampai akhir wawancara.

4. Merekam isi pembicaraan menggunakan *audio recorder* pada *handphone*.

C. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah pemimpin yang ideal menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah fungsi seorang pemimpin yang baik terhadap rakyatnya menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
4. Bagaimana perspektif DPD PKS mengenai hukum memilih pemimpin non muslim di Negara dengan mayoritas penduduknya adalah seorang muslim?
5. Bagaimana perspektif DPD PKS mengenai masyarakat muslim yang memilih pemimpin non muslim?
6. Bagaimana pengaruh perspektif tersebut terhadap eksistensi yang dimiliki oleh PKS ?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Ucapan terimakasih.
3. Mengakhiri wawancara.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Skripsi : **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tempat/Tanggal : Jl. Bumi Manti 2 No. 46, KP. Baru, Kedaton, Bandar
Lampung, 30 Agustus 2019.

Pewawancara : Muhammad Ilham

A. Identitas Informan

1. Nama : Radek Cik Awang
2. Jabatan : Sekertaris Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPD
PKS Kota Bandar Lampung 2015-2020.

B. Pendahuluan

1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian
dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya untuk kepentingan
penelitian.
3. Durasi wawancara disesuaikan dengan proses wawancara dari awal
sampai akhir wawancara.

4. Merekam isi pembicaraan menggunakan *audio recorder* pada *handphone*.

C. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah pemimpin yang ideal menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah fungsi seorang pemimpin yang baik terhadap rakyatnya menurut fungsionaris DPD PKS Kota Bandar Lampung?
4. Bagaimana perspektif DPD PKS mengenai hukum memilih pemimpin non muslim di Negara dengan mayoritas penduduknya adalah seorang muslim?
5. Bagaimana perspektif DPD PKS mengenai masyarakat muslim yang memilih pemimpin non muslim?
6. Bagaimana pengaruh perspektif tersebut terhadap eksistensi yang dimiliki oleh PKS ?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Ucapan terimakasih.
3. Mengakhiri wawancara.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Skripsi : **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tempat/Tanggal : Perumahan Pramuka Garden Residen, Kec Rajabasa 06
November 2019.

Pewawancara : Muhammad Ilham

A. Identitas Informan

1. Nama : Windi Bob Putra
2. Pekerjaan : Devloper
3. Agama : Islam

B. Pendahuluan

1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya untuk kepentingan penelitian.
3. Durasi wawancara disesuaikan dengan proses wawancara dari awal sampai akhir wawancara.

4. Merekam isi pembicaraan menggunakan *audio recorder* pada *handphone*.

C. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda mengetahui bahwa PKS merupakan partai politik Islam?
2. Apa yang anda ketahui tentang PKS?
3. PKS merupakan partai Islam yang memiliki perspektif bahwa dalam memilih seorang pemimpin kita lebih disarankan untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Apakah anda setuju dengan perspektif tersebut?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap perspektif tersebut?
5. Bagaimana keberadaan dan eksistensi PKS dilingkungan sekitar anda?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Ucapan terimakasih.
3. Mengakhiri wawancara.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Skripsi : **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tempat/Tanggal : Perumahan Pramuka Garden Residen, Kec. Rajabasa, 06
November 2019.

Pewawancara : Muhammad Ilham

A. Identitas Informan

1. Nama : Doni Sagiar
2. Pekerjaan : Pengusaha
3. Agama : Islam

B. Pendahuluan

1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya untuk kepentingan penelitian.
3. Durasi wawancara disesuaikan dengan proses wawancara dari awal sampai akhir wawancara.

4. Merekam isi pembicaraan menggunakan *audio recorder* pada *handphone*.

C. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda mengetahui bahwa PKS merupakan partai politik Islam?
2. Apa yang anda ketahui tentang PKS?
3. PKS merupakan partai Islam yang memiliki perspektif bahwa dalam memilih seorang pemimpin kita lebih disarankan untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Apakah anda setuju dengan perspektif tersebut?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap perspektif tersebut?
5. Bagaimana keberadaan dan eksistensi PKS dilingkungan sekitar anda?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Ucapan terimakasih.
3. Mengakhiri wawancara.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Skripsi : **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tempat/Tanggal : Perumahan Imam Bonjol, Kec. Langkapura 06 November
2019.

Pewawancara : Muhammad Ilham

A. Identitas Informan

1. Nama : Wahyu Amanda
2. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Agama : Islam

B. Pendahuluan

1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya untuk kepentingan penelitian.
3. Durasi wawancara disesuaikan dengan proses wawancara dari awal sampai akhir wawancara.

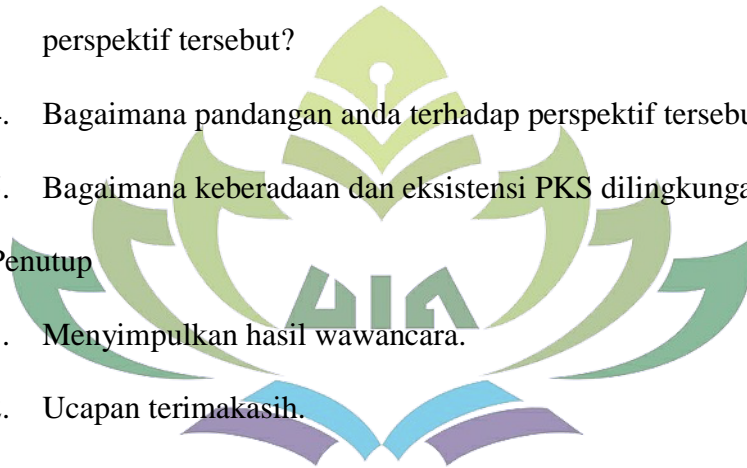
4. Merekam isi pembicaraan menggunakan *audio recorder* pada *handphone*.

C. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda mengetahui bahwa PKS merupakan partai politik Islam?
2. Apa yang anda ketahui tentang PKS?
3. PKS merupakan partai Islam yang memiliki perspektif bahwa dalam memilih seorang pemimpin kita lebih disarankan untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Apakah anda setuju dengan perspektif tersebut?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap perspektif tersebut?
5. Bagaimana keberadaan dan eksistensi PKS dilingkungan sekitar anda?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Ucapan terimakasih.
3. Mengakhiri wawancara.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Skripsi : **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tempat/Tanggal : Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat 07 November 2019.

Pewawancara : Muhammad Ilham

A. Identitas Informan

1. Nama : Ibu Masnun
2. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Agama : Islam

B. Pendahuluan

1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya untuk kepentingan penelitian.
3. Durasi wawancara disesuaikan dengan proses wawancara dari awal sampai akhir wawancara.

4. Merekam isi pembicaraan menggunakan *audio recorder* pada *handphone*.

C. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda mengetahui bahwa PKS merupakan partai politik Islam?
2. Apa yang anda ketahui tentang PKS?
3. PKS merupakan partai Islam yang memiliki perspektif bahwa dalam memilih seorang pemimpin kita lebih disarankan untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Apakah anda setuju dengan perspektif tersebut?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap perspektif tersebut?
5. Bagaimana keberadaan dan eksistensi PKS dilingkungan sekitar anda?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Ucapan terimakasih.
3. Mengakhiri wawancara.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PEDOMAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

Judul Skripsi : **MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DI NEGARA
MAYORITAS MUSLIM (PERSPEKTIF DPD PKS
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tempat/Tanggal : Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, 07 November 2019.

Pewawancara : Muhammad Ilham

A. Identitas Informan

1. Nama : Ibu Putri Emti
2. Pekerjaan : Pengusaha
3. Agama : Islam

B. Pendahuluan

1. Perkenalan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian dan menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya untuk kepentingan penelitian.
3. Durasi wawancara disesuaikan dengan proses wawancara dari awal sampai akhir wawancara.

4. Merekam isi pembicaraan menggunakan *audio recorder* pada *handphone*.

C. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah anda mengetahui bahwa PKS merupakan partai politik Islam?
2. Apa yang anda ketahui tentang PKS?
3. PKS merupakan partai Islam yang memiliki perspektif bahwa dalam memilih seorang pemimpin kita lebih disarankan untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Apakah anda setuju dengan perspektif tersebut?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap perspektif tersebut?
5. Bagaimana keberadaan dan eksistensi PKS dilingkungan sekitar anda?

D. Penutup

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Ucapan terimakasih.
3. Mengakhiri wawancara.

LAMPIRAN DOKUMENTASI GAMBAR



Gambar 1. Foto Wawancara dengan Bapak Sofian Sauri, S.P.



Gambar 2. Foto Wawancara dengan Bapak Raden Cik Awang, S.T.





Gambar 3. Foto Wawancara dengan Bapak Aep Syaripudin, S. P., Bapak Sofyan Sauri, S.P., dan Bapak Agus Djumandi, A. Md.



Gambar 4. Foto Wawancara dengan Pak Wahyu.



Gambar 5. Foto wawancara dengan Ibu Putri Emti